



**LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
ANGKATAN 1 TAHUN 2018**

**INVENTARISASI ISU SEBAGAI SARANA
OPTIMALISASI DUKUNGAN PUSAT KAJIAN
ANGGARAN DENGAN KOMISI IX DPR RI**

Oleh :

FAJRI RAMADHAN, S.E.

NIP. 199402232018011003

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AKTUALISASI “INVENTARISASI ISU SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI KOORDINASI PUSAT KAJIAN ANGGARAN DENGAN KOMISI IX DPR RI”

Nama : Fajri Ramadhan
NIP : 199402232018011003
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Instansi : Pusat Kajian Anggaran

Cisarua, 2 Oktober 2018

Mengetahui,
Coach


Bambang Wiyoso, S.T., M.Si.
NIP.197204112005011001

Menyetujui,
Mentor


Slamet Widodo, S.E., M.E.
NIP. 196702181993021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas bimbingan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS dan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai salah satu prasyarat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Aktualisasi ini dapat diselesaikan karena tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Drs. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si., Anggota DPR RI Komisi IX
2. Drs. Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
3. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.
4. Mardi Harjo, S.E., M.Si., selaku Kepala Bagian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
5. Bambang Wiyoso, S.T., M.Si., selaku *coach* PNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
6. Slamet Widodo, S.E., M.E., selaku mentor kegiatan Aktualisasi Diklatsar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
7. Achmad Yugo Pidhegso, Sylvia Febrina, Eko Adityo Ananto, Vita Puji Lestari, Sekar Aditya Dwikirana, Faqih Nur Huda, dan Slamet Dhul Fadli yang senantiasa membersamai pelaksana aktualisasi dalam berjuang di DPR RI.
8. Seluruh pegawai DPR RI, utamanya pegawai Komisi IX.

Laporan ini menyajikan proses aktualisasi nilai-nilai Latihan Dasar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI. Namun lebih dari itu, laporan ini merupakan manifestasi semangat dan kontribusi pelaksana aktualisasi dalam menawarkan perubahan paradigma dalam cara kerja Setjen dan BK DPR RI. Pelaksana aktualisasi percaya bahwa orientasi kerja Setjen dan BK DPR RI adalah pelayanan terbaik kepada Anggota DPR RI. Semoga segala hal yang ditulis pada laporan ini bukan diartikan sebagai hal negatif tetapi menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen Setjen dan BK DPR RI, utamanya Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 28 September 2018

Fajri Ramadhan, S.E.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran	1
B Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama.....	2
II RANCANGAN AKTUALISASI	4
A Deskripsi Isu	4
B Pemilihan Isu Prioritas	6
C Pemilihan Gagasan Prioritas	6
D Matriks Rancangan Aktualisasi	7
E Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	12
F Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi	12
III PELAKSANAAN AKTUALISASI	13
A Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	13
B Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi.....	30
IV PENUTUP	32
A Kesimpulan	32
B Saran	33
C Rencana Tindak Lanjut.....	33
LAMPIRAN	35

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN
- b. Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan APBN
- d. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Dalam mendukung fungsi anggaran tersebut, DPR RI didukung oleh Badan Keahlian DPR RI sebagai lembaga pendukung (*supporting system*) DPR RI. Sebagai lembaga pendukung yang bertugas mendukung fungsi utama DPR RI, Badan Keahlian didukung oleh 5 unit eselon II yaitu: Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian.

Terkait fungsi anggaran, DPR RI didukung oleh Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, PKA memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PKA memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;

- d) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- f) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
- g) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
- h) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- i) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- j) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- k) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pusat kajian Anggaran, Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan tugas dan fungsi dari Bagian Analisa APBN pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Setelah Badan Keahlian terbentuk pada tahun 2015, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN berubah menjadi Pusat Kajian Anggaran di bawah Badan Keahlian DPR RI. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran memiliki visi dan misi sebagai berikut:

➤ Visi

- Pusat Kajian Anggaran yang professional: mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
- Pusat Kajian Anggaran yang andal: mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel: mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

➤ **Misi**

- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- Memperkuat manajemen pengetahuan.
- Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN

B. Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama

Jabatan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.39 Tahun 2014. Berdasarkan aturan tersebut, yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas ruang lingkup jabatan tersebut, Analis APBN Ahli Pertama memiliki 4 tugas utama yaitu:

1. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD. Analisis yang dilakukan dengan prosedur: penentuan tema, pengumpulan data awal, penentuan *outline*, penulisan analisis, diskusi dengan pakar, perbaikan analisis, presentasi analisis, dan mendokumentasikan hasil analisis
2. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim. Penulisan referensi dilakukan dengan prosedur: penyusunan draft referensi, diskusi referensi dengan pakar, melakukan perbaikan referensi, menyelenggarakan presentasi referensi, dan mendokumentasikan hasil referensi
3. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC) secara individual, sebagai anggota atau ketua tim. Penulisan ARC dilakukan dengan prosedur: penyusunan analisis, presentasi ARC dengan pakar, dan melakukan dokumentasi hasil ARC
4. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC sebagai penyaji, pakar, pembahas, moderator, dan peserta/anggota diskusi.

BAGIAN II. RANCANGAN AKTUALISASI

A. DESKRIPSI ISU

1. Belum Optimalnya Koordinasi Antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)

Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016, diketahui bahwa jenis layanan dengan skor terendah dalam hal kepuasan adalah Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan (skor: 71,98) dan Kemudahan mendapatkan layanan (skor: 71,60). Secara mendalam, survey ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan nilai terendah pada jenis-jenis layanan Badan Keahlian DPR RI yaitu:

- a. Banyak anggota yang tidak menerima produk BK DPR RI, perlu ada yang bertanggung jawab terhadap pendistribusiannya
- b. Terbitkan hasil penelitian yang sesuai dengan pembahasan di DPR RI, cepat dan mudah di akses

Atas kondisi ini dan testimoni Analis APBN, perlu adanya penguatan koordinasi dengan Anggota DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. Penguatan koordinasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dan produk yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan Anggota DPR RI. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan bahwa produk yang dikerjakan Badan Keahlian DPR RI, khususnya PKA tidak relevan dengan kebutuhan Anggota DPR RI.

Komisi IX menjadi pilihan penulis karena berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 terdapat anggaran yang sifatnya wajib atau *mandatory* yaitu anggaran kesehatan. Besaran anggaran kesehatan berdasarkan undang-undang tersebut adalah 5 persen dari total belanja negara. Selain anggaran kesehatan pada Komisi IX yang sifatnya strategis, penulis memilih Komisi IX karena mentor dan penulis pernah ditugaskan untuk melakukan pendampingan pembahasan APBN di Komisi IX. Hal ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah untuk mempermudah pengerjaan aktualisasi.

2. Belum Optimalnya Penyimpanan Data Pendukung Kinerja PKA

Berdasarkan testimoni Analis APBN dan observasi yang telah dilakukan selama 2 bulan, diketahui bahwa terdapat hal-hal yang perlu dibenahi terkait penyimpanan data pendukung kinerja PKA. Data-data yang perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan adalah: data materi presentasi pakar dan data nomor telepon pakar. Saat ini penyimpanan data presentasi pakar masih tercecer diantara Analis APBN, begitu juga data nomor

telepon pakar. Dalam jangka panjang apabila permasalahan ini tidak dibenahi, PKA akan mengalami kesulitan dalam menyediakan data-data referensi yang andal untuk pembuatan analisis. Selain itu terdapat potensi kesulitan dalam mengundang pakar apabila tidak terdapat 1 database yang jelas.

3. Belum Optimalnya Kemampuan Metode Ilmiah dan Penulisan CPNS Analisis

APBN

Berdasarkan testimoni Analisis APBN dan testimoni CPNS Analisis APBN, diperlukan pelatihan dasar metode ilmiah dan penulisan. Hal ini senada dengan salah satu rekomendasi hasil survey indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keahlian DPR RI adalah *upgrading* berkelanjutan, berkorelasi dengan *reward* dan *punishment*, harus kompeten dan profesional. Perlunya pelatihan metode ilmiah dan penulisan dasar ini karena disadari bahwa latar belakang CPNS Analisis APBN berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda sebelum menjadi CPNS Analisis APBN. Apabila tidak ada pelatihan kemampuan dasar yang disetarakan, dikhawatirkan akan menghambat kinerja Pusat Kajian Anggaran terutama dalam hal penulisan analisis, ARC, buku, dan produk penulisan lainnya.

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)	5	4	5	14
2	Belum optimalnya penyimpanan data pendukung kinerja PKA	4	3	4	11
3	Belum optimalnya Kemampuan Metode Ilmiah dan Penulisan CPNS Analis APBN	4	4	5	13

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :

- 1) Isu ke-1 dengan rumusan isu : **Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)**

C. PEMILIHAN GAGASAN PRIORITAS

Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Analisis USG

No	Gagasan	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Pendampingan Analis APBN ke Komisi IX	5	4	3	12
2	Inventarisasi isu dan data APBN Komisi IX	4	5	5	14
3	Koordinasi dengan sekretariat Komisi IX via Biro Persidangan	3	4	4	11

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka gagasan yang dipilih adalah :

- 1) Gagasan ke-2 dengan rumusan gagasan : **Inventarisasi isu dan data APBN Komisi IX**

D. RANCANGAN AKTUALISASI

- Unit Kerja** : Pusat Kajian Anggaran
- Identifikasi Isu** : 1. Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)
2. Belum optimalnya penyimpanan data pendukung kinerja PKA
3. Belum optimalnya kemampuan metode ilmiah dan penulisan CPNS Analis APBN
- Isu yang Diangkat** : **Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)**
- Gagasan Pemecahan Isu** : 1. Pendampingan Analis APBN ke Komisi IX
2. Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX
3. Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX via biro persidangan
- Gagasan terpilih adalah : Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Konsultasi dengan pimpinan	1. Mengagendakan pertemuan dengan pimpinan 2. Konsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi	Surat keterangan melaksanakan kegiatan aktualisasi	Dari segi Agenda II, kegiatan konsultasi memenuhi nilai Akuntabilitas . Hal ini karena dengan adanya output berupa surat keterangan melaksanakan kegiatan aktualisasi, menjadi alat akuntabilitas yang jelas	Selaras dengan keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan konsultasi dengan pimpinan berkontribusi dalam mewujudkan visi pusat kajian anggaran yang akuntabel	Kegiatan konsultasi dengan pimpinan memenuhi nilai professional pada nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI. Dengan perwujudan nilai akuntabilitas, maka nilai professional organisasi semakin menguat

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Perencanaan kegiatan inventarisasi data APBN Komisi IX	1. Konsultasi dengan mentor terkait dokumen rancangan kegiatan 2. Mempelajari isu-isu umum pada komisi IX dari internet 3. Pembuatan dokumen rancangan perencanaan kegiatan	Dokumen perencanaan kegiatan inventarisasi data	<ul style="list-style-type: none"> - Dari segi Agenda II, kegiatan perencanaan memenuhi nilai Komitmen Mutu. Hal ini karena perencanaan yang baik dapat memastikan keberhasilan tujuan kegiatan dan meminimalisir risiko kendala-kendala kegiatan. - Dari segi Agenda II, kegiatan perencanaan memenuhi konsep Akuntabilitas. Hal ini karena perencanaan yang baik merupakan salah satu langkah membentuk <i>framework</i> akuntabilitas. 	Perencanaan yang baik dapat berkontribusi mewujudkan visi Pusat Kajian Anggaran yang professional. Hal ini karena perencanaan berperan penting dalam mewujudkan profesionalitas organisasi	Serupa dengan kontribusi terhadap visi Pusat Kajian Anggaran yang professional, kegiatan perencanaan yang baik dapat memberikan penguatan nilai professional pada organisasi
3	Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX perihal linimasa program	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mencari kontak sekretariat komisi IX 3. Menghubungi kontak sekretariat komisi IX untuk menentukan waktu pertemuan 4. Bertemu dengan kontak sekretariat komisi IX untuk memaparkan agenda program	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan kegiatan pertemuan - Dokumentasi foto pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dari segi agenda II, kegiatan koordinasi memenuhi konsep Etika Publik karena dengan adanya koordinasi, informasi diberikan secara benar dan tidak menyedatkan pihak lain - Dari segi agenda III, kegiatan koordinasi memenuhi konsep Whole of Government. Hal ini karena koordinasi merupakan salah 	Kegiatan koordinasi selaras dengan visi pusat kajian anggaran yang hendak mewujudkan pusat kajian anggaran yang andal melalui koordinasi dan integrasi	Koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai profesionalisme

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		5. Membuat database kontak tenaga ahli komisi		satu bentuk implementasi <i>Whole of Government</i> .		
4	Membuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi IX dan panduan pengisian form	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mereview anggaran-anggaran mitra kerja utama pada komisi IX 3. Membuat format form inventarisasi isu dan panduan pengisian form 4. Menyebarkan form daftar inventarisasi isu komisi IX	Format form inventarisasi isu	<ul style="list-style-type: none"> - Dari segi agenda II, kegiatan inventarisasi isu memenuhi konsep komitmen mutu, hal ini karena terdapat inovasi pada proses pengumpulan isu APBN dengan media penyebaran form - Dari segi agenda III, kegiatan inventarisasi memenuhi konsep Pelayanan Publik. Hal ini karena kegiatan inventarisasi isu mengakomodir kebutuhan Anggota Dewan dalam mendapatkan analisis yang sesuai dengan kebutuhan 	Kegiatan inventarisasi isu mewujudkan visi pusat kajian anggaran yang andal. Dengan penyediaan analisis yang sesuai dengan kebutuhan anggota dewan, merepresentasikan keandalan pusat kajian anggaran	Kegiatan inventarisasi isu menguatkan nilai profesional organisasi Setjen dan BK DPR RI
5	Sosialisasi dan Verifikasi hasil form	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Pembuatan materi presentasi tentang tusi pusat kajian anggaran 3. Mempresentasikan tusi PKA	<ul style="list-style-type: none"> - Media presentasi tusi PKA - Form isu yang telah terisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dari segi agenda II, kegiatan sosialisasi memenuhi konsep Etika Publik, karena terdapat bentuk komunikasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika publik 	Sosialisasi menguatkan visi pusat kajian anggaran yang andal. Diharapkan dengan sosialisasi yang jelas dapat menguatkan koordinasi dan integrasi pusat kajian anggaran dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	Sosialisasi menguatkan nilai profesional Setjen dan BK DPR RI. Sosialisasi yang baik merupakan bentuk profesionalitas dan pelayanan yang baik kepada anggota dewan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4. Wawancara atau tanya jawab mengenai hasil pengisian form		- Dari segi agenda III, kegiatan sosialisasi memenuhi konsep Pelayanan Publik , karena sosialisasi dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada komisi		
6	Pengumpulan form data APBN yang dibutuhkan PKA untuk analisis mendatang	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis mendatang 3. Melakukan penyusunan database data APBN mitra kerja komisi IX	Dokumen data APBN mitra kerja Komisi IX	- Dari segi agenda II, kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data APBN komisi IX merupakan pemenuhan konsep komitmen mutu . Hal ini karena dengan pengumpulan data APBN, pembuatan analisis di masa yang akan datang menjadi lebih efisien. - Dari segi agenda III, kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data APBN komisi IX merupakan pemenuhan konsep Whole of Government . Hal ini karena adanya koordinasi yang baik, kebutuhan data untuk penyelesaian pekerjaan dapat terpenuhi	Kegiatan pengumpulan data APBN komisi IX merupakan salah satu langkah kontribusi menuju visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional. Dengan tersedianya data yang andal akan mendukung kinerja Pusat Kajian Anggaran	Kegiatan pengumpulan data APBN komisi IX menguatkan nilai professional Setjen dan BK DPR RI.
7	Penyusunan laporan kegiatan	1. Melakukan koordinasi dengan mentor	Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi	Dari segi agenda II, kegiatan penyusunan laporan merupakan	Pembuatan laporan kegiatan berkontribusi secara jelas dalam	Pembuatan laporan merupakan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Melakukan rekapitulasi lampiran output 3. Melakukan penulisan laporan 4. Melakukan pencetakan laporan		implementasi nilai Akuntabilitas . Hal ini karena laporan kegiatan merupakan salah satu alat mekanisme akuntabilitas	mewujudkan pusat kajian anggaran yang akuntabel	implementasi penguatan nilai akuntabilitas.

E. POTENSI KENDALA

Terdapat beberapa hal yang menjadi potensi kendala dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi data Komisi IX. Berikut hal-hal yang diidentifikasi menjadi potensi kendala pelaksanaan kegiatan:

1. Dinamika kerja anggota dewan dan atau sekretariat Komisi IX yang berpotensi tidak menentu. Hal ini dapat mengancam ketepatan waktu penyelesaian tugas
2. Tidak lengkapnya data yang disediakan komisi IX untuk mendukung kinerja PKA
3. Keterbatasan waktu penyelesaian analisis apabila terdapat tugas pokok PKA
4. Sulitnya mendapatkan kontak-kontak penting untuk penyelesaian kegiatan

F. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	M E I	JUNI					JULI				AGUSTUS				SEPT			
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Konsultasi dengan pimpinan																		
2.	Perencanaan kegiatan inventarisasi data Komisi IX																		
3.	Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX perihal linimasa program																		
4.	Membuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi IX dan panduan pengisian form																		
5.	Sosialisasi dan Verifikasi hasil form																		
6.	Pengumpulan form data APBN yang dibutuhkan PKA untuk analisis mendatang																		
7.	Penyusunan laporan kegiatan																		

Keterangan:

■ Libur Hari Raya

■ Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

BAGIAN III PELAKSANAAN AKTUALISASI

- Unit Kerja** : Pusat Kajian Anggaran
- Identifikasi Isu** : 1. Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)
2. Belum optimalnya penyimpanan data pendukung kinerja PKA
3. Belum optimalnya kemampuan metode ilmiah dan penulisan CPNS Analis APBN
- Isu yang Diangkat** : **Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)**
- Gagasan Pemecahan Isu** : 1. Pendampingan Analis APBN ke Komisi IX
2. Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX
3. Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX via biro persidangan
- Gagasan terpilih adalah** : Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX

A. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan 1	Konsultasi dengan pimpinan
Tahapan Kegiatan	1. Mengagendakan pertemuan dengan pimpinan 2. Konsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi
Output	Surat keterangan melaksanakan kegiatan aktualisasi (SKMK). Bukti SKMK dapat dilihat pada lampiran 1.
Tanggal Pelaksanaan	Rabu, 30 Mei 2018
Hambatan	Terdapat satu hambatan pada kegiatan 1 yaitu kesalahan pelaksana aktualisasi karena belum melengkapi SKMK dengan paraf dari Mentor. Paraf dari mentor merupakan bukti bahwa SKMK telah diperiksa dan disetujui mentor. Namun karena miskordinasi, pelaksana aktualisasi langsung meminta tanda tangan Kepala Pusat Kajian Anggaran tanpa meminta paraf mentor.
Solusi	Setelah menyadari kekurangan pada SKMK, pelaksana aktualisasi mencetak kembali SKMK kemudian meminta paraf mentor terlebih dahulu sebelum meminta persetujuan Kepala Pusat Kajian Anggaran
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Tahapan kegiatan 1 – Untuk memulai kegiatan 1, koordinasi awal dilakukan dengan pihak tata usaha Pusat Kajian Anggaran. Sesuai dengan hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksana aktualisasi berinisiatif untuk langsung meminta persetujuan dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 28 Mei 2018. Namun karena diperlukan juga paraf dari mentor, maka pelaksana aktualisasi kembali mengatur waktu dengan mentor agar dapat meminta paraf dari mentor terlebih dahulu sebelum meminta persetujuan Kepala Pusat Kajian Anggaran. Setelah mendapat paraf mentor, pada tanggal 30 Mei 2018 pelaksana aktualisasi mendapatkan SKMK yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran. Tahapan kegiatan 1 telah sesuai dengan mata pelatihan mengenai Akuntabilitas . Hal ini karena dengan adanya SKMK, maka output tersebut menjadi bukti yang

	<p>dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan I juga sesuai dengan mata pelatihan Whole of Government (WoG) dan Etika publik. Hal ini karena mengagendakan pertemuan terkait dengan koordinasi yang baik dan melaksanakan etika kesopanan.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Bersamaan dengan pemberian persetujuan melaksanakan kegiatan aktualisasi, pelaksana aktualisasi juga berkonsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran. Dalam konsultasi yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018, pelaksana aktualisasi meminta arahan dan saran dari Kepala Pusat Kajian Anggaran. Saran dan arahan yang diberikan adalah agar dapat melaksanakan kegiatan aktualisasi tepat waktu tanpa mengganggu kegiatan pekerjaan primer. Selain itu saran yang diberikan adalah agar selalu melakukan koordinasi dengan mentor dan bagian sekretariat Komisi IX. Tahapan kegiatan kedua telah sesuai dengan mata pelatihan mengenai Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Hal ini karena proses konsultasi berupaya untuk meningkatkan mutu dan mencegah korupsi waktu.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan pimpinan sesuai dengan visi Pusat Kajian Anggaran yang andal. Pusat Kajian Anggaran yang andal ini bermakna salah satunya mampu melakukan koordinasi untuk mewujudkan tujuan. Secara jelas konsultasi berarti berkoordinasi untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Pelaksanaan kegiatan konsultasi sesuai dengan nilai organisasi yang akuntabel. SKMK menjadi sebuah bukti akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan ketika melaksanakan kegiatan aktualisasi. Sebagai contoh, SKMK berguna ketika terdapat pertanyaan dari Sekretariat Komisi IX mengenai legalitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dengan adanya SKMK, pihak Komisi IX pasti tidak akan melarang pelaksanaan kegiatan aktualisasi karena terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>

Kegiatan 2	Perencanaan kegiatan inventarisasi data Komisi IX
Tahapan Kegiatan	1. Konsultasi dengan mentor terkait perencanaan kegiatan; 2. Mempelajari isu-isu umum pada Komisi IX dari internet 3. Pembuatan dokumen rancangan perencanaan kegiatan
Output	Dokumen perencanaan kegiatan inventarisasi data isu APBN Komisi IX. Bukti dokumen perencanaan kegiatan terdapat pada lampiran 2.
Tanggal Pelaksanaan	31 Mei 2018-8 Juni 2018
Hambatan	Terdapat satu hambatan pada kegiatan 2 yaitu pembelajaran isu-isu Komisi IX dari internet. Dalam proses pembelajaran sebenarnya tidak terdapat kendala, karena sumber-sumber pembelajaran dari internet sangat banyak. Namun yang menjadi kendala adalah apakah isu yang ada pada internet merupakan isu spesifik yang sesuai dengan pembahasan didalam ruang sidang atau tidak.
Solusi	Untuk memastikan isu yang dipelajari dari internet adalah isu yang benar-benar sesuai dengan hal yang dibahas dalam komisi, pelaksana aktualisasi berkonsultasi dengan mentor. Mentor merupakan Analis APBN Ahli Muda yang cukup berpengalaman dalam pembahasan anggaran di Komisi IX sehingga mengetahui secara spesifik isu-isu yang terdapat pada Komisi IX.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Sebelum memulai kegiatan 2, pelaksana aktualisasi berkonsultasi dengan mentor terkait teknis perencanaan kegiatan aktualisasi. Konsultasi dilakukan untuk memastikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Konsultasi juga dilakukan untuk menentukan format output agar hal-hal penting dapat tersampaikan dengan baik kepada Sekretariat Komisi IX. Koordinasi dengan mentor sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini karena pada proses konsultasi, pelaksana aktualisasi mengidentifikasi hal-hal teknis dan risiko, sehingga memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bermutu baik</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Tahapan kegiatan kedua berguna agar pelaksana aktualisasi memiliki pemahaman awal atas isu-isu mengenai kesehatan dan ketenagakerjaan di Komisi IX. Pembelajaran mengenai isu-isu kesehatan dan ketenagakerjaan dilakukan melalui media internet. Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Pelayanan Publik dan Manajemen ASN karena dengan pemahaman awal yang baik, pelaksana aktualisasi dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pemangku kepentingan utama kegiatan aktualisasi ini yaitu Komisi IX. Pemahaman yang baik mengenai isu APBN Komisi IX juga menunjang peningkatan kompetensi ASN.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Berdasarkan hal yang telah dilakukan pada tahapan kegiatan 1 dan 2, tahapan kegiatan 3 dilaksanakan pada minggu pertama Bulan Juni. Berdasarkan konsultasi dengan mentor, disepakati bahwa rancangan kegiatan yang diserahkan kepada Sekretariat Komisi IX merupakan dokumen rancangan aktualisasi yang telah disimplifikasi pada bagian deskripsi isu, rumusan pemilihan isu, dan yang paling utama adalah simplifikasi pada bagian matriks rancangan aktualisasi. Dapat dilihat pada lampiran 3 bahwa matriks</p>

	rancangan aktualisasi diubah menjadi matriks pedoman teknis kegiatan yang menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Akuntabilitas , karena perencanaan yang baik sesuai dengan <i>framework</i> akuntabilitas. Pembuatan dokumen juga sesuai dengan mata pelatihan Nasionalisme , karena pembuatan dokumen menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Pelaksanaan kegiatan 2 sesuai dengan visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional. Kontribusi terhadap visi ini terlihat dari tahapan kegiatan 2 dan 3 yang berorientasi pada profesionalitas pelaksana aktualisasi. Dengan pemahaman yang memadai dan perencanaan teknis yang baik, mencerminkan profesionalitas pelaksana aktualisasi.
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan 2 memberikan penguatan nilai professional. Sejalan dengan kontribusi terhadap Visi Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, maka kontribusi ini juga menguatkan nilai organisasi mengenai profesionalitas.

Kegiatan 3	Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX perihal linimasa program
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor; 2. Mencari kontak sekretariat komisi IX; 3. Menghubungi kontak sekretariat komisi IX untuk menentukan waktu pertemuan; 4. Bertemu dengan kontak sekretariat komisi IX untuk memaparkan agenda program; 5. Membuat database kontak tenaga ahli komisi.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan kegiatan pertemuan (Lampiran 3) - Foto pertemuan yang diganti potongan gambar percakapan (Lampiran 4)
Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2018-6 Juli 2018
Hambatan	Dalam pelaksanaan kegiatan 3, terdapat hambatan dalam membuat output laporan pertemuan. Hal ini karena pertemuan dilaksanakan secara informal akibat padatnya jadwal Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX. Pertemuan yang dilaksanakan
Solusi	Untuk mengantisipasi padatnya kegiatan Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX, pelaksana aktualisasi berinisiatif untuk melaksanakan pertemuan secara informal agar tujuan kegiatan tetap tercapai.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 2 dan 3 – Terdapat perubahan urutan tahapan kegiatan pada kegiatan ketiga. Sejak minggu kedua dan ketiga Bulan Juni atau saat libur Hari Raya Idul Fitri, pelaksana aktualisasi telah mencari kontak Komisi IX. Berdasarkan pencarian pada kontak, pelaksana aktualisasi berhasil mendapatkan kontak Ibu Minarni, S.H. yang merupakan Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX. Pada saat libur Hari Raya Idul Fitri, pelaksana aktualisasi telah menghubungi Ibu Minarni secara informal untuk mempersiapkan pertemuan dengan beliau saat libur telah usai. Sebelum menghubungi Ibu Minarni secara informal, pelaksana aktualisasi terlebih dahulu meminta izin mentor melalui pesan elektronik karena dalam posisi libur Hari Raya Idul Fitri.</p> <p>Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Etika Publik. Hal ini karena sebelum memasuki ranah formal pekerjaan, pelaksana aktualisasi telah merintis komunikasi secara informal. Tindakan ini sesuai dengan norma kesopanan dan etika yang baik.</p> <p>Tahapan kegiatan 1– Berdasarkan komunikasi yang dilakukan pelaksana aktualisasi kepada Ibu Minarni, disepakati bahwa pertemuan dengan Ibu Minarni dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018. Sebelum pertemuan dengan Ibu Minarni dilaksanakan, pelaksana aktualisasi berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor pada tanggal Juni 2018. Pada saat konsultasi, pelaksana aktualisasi menjelaskan hal yang telah dilakukan selama libur Hari Raya Idul Fitri dalam upaya untuk mencari kontak dan menghubungi Bagian Sekretariat Komisi IX. Pada kesempatan konsultasi kali ini, mentor juga memeriksa form rancangan aktualisasi yang akan diserahkan dan dijelaskan kepada pihak Komisi IX.</p>

	<p>Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Akuntabilitas dan Komitmen Mutu. Hal ini karena melalui tahapan kegiatan konsultasi, pelaksana aktualisasi menjelaskan hal yang telah dilakukan selama libur Hari Raya Idul Fitri dan meminta saran atas pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya.</p> <p>Tahapan kegiatan 4 – Setelah berkonsultasi dengan mentor, pelaksana aktualisasi melaksanakan pertemuan dengan Ibu Minarni pada tanggal 29 Juni 2018. Pertemuan dilaksanakan secara informal di ruang Sekretariat Komisi IX. Pertemuan berlangsung sekitar 15 menit dengan membahas gambaran umum pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh pelaksana aktualisasi berdasarkan rancangan aktualisasi yang dibuat pada kegiatan 2 (lihat lampiran 2). Dalam proses pertemuan, pelaksana aktualisasi tidak membahas rancangan aktualisasi secara keseluruhan, namun memberikan penekanan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya krusial seperti pengumpulan isu kesehatan dan ketenagakerjaan, pengumpulan data, dan lain-lain. Setelah pelaksana menjelaskan gambaran umum aktualisasi, Ibu Minarni menyatakan siap untuk dapat membantu pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dan pada saat pertemuan memberikan nomor kontak Koordinator Staf Tenaga Ahli bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Komisi IX. Karena pertemuan dilaksanakan secara informal, penulis melampirkan bukti berupa potongan gambar percakapan pelaksana aktualisasi dengan Ibu Minarni (lampiran 4)</p> <p>Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Etika Publik dan Pelayanan Publik karena dengan adanya tahapan kegiatan ini menunjukkan etika dan pelayanan yang baik dengan Sekretariat Komisi IX. Etika yang baik ini menjadi awal yang baik dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi.</p> <p>Tahapan kegiatan 5 – Setelah pemaparan dan terdapat persetujuan dari Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX, Ibu Minarni memberikan 2 kontak nomor telepon Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX. Kontak yang diberikan adalah kontak Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan yaitu Latifatul Hasanah, S.Si, MPH (Ifa) dan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang ketenagakerjaan yaitu Abdul Wahab Samad, SE, MM (Wahab). Ibu Minarni menjelaskan bahwa kedepannya untuk teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat berkoordinasi dengan Ibu Ifa dan Pak Wahab. Pada rancangan aktualisasi pelaksana aktualisasi merencanakan untuk membuat daftar kontak Staf Tenaga Ahli Komisi IX, namun pada praktiknya kedua koordinator staf tenaga ahli ini merupakan orang-orang yang paling memahami bidang kesehatan dan ketenagakerjaan di Komisi IX dan menurut Ibu Minarni pelaksana aktualisasi cukup untuk menghubungi kedua koordinator ini.</p> <p>Tahapan kegiatan ini sesuai dengan mata pelatihan Whole of Government (WoG). Hal ini karena dengan adanya kontak Staf Tenaga Ahli menjadi akses awal untuk teknis pengerjaan kegiatan aktualisasi. Komunikasi dan koordinasi dengan segala unsur Komisi IX termasuk Staf Tenaga Ahli menentukan keberhasilan kegiatan aktualisasi.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Pelaksanaan kegiatan 3 sesuai dengan visi Pusat Kajian Anggaran yang andal. Hal ini terlihat dari koordinasi yang terbangun dengan Kepala Bagian</p>

	Sekretariat Komisi IX untuk mencapai tujuan akhir berupa penyelesaian kegiatan aktualisasi.
Penguatan Nilai Organisasi	Pelaksanaan kegiatan 3 menguatkan nilai professional pada organisasi Setjen dan BK DPR RI. Dengan menjelaskan alur kegiatan aktualisasi secara jelas dan terperinci maka membuktikan penguatan nilai professional.

Kegiatan 4	Membuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi IX dan panduan pengisian form
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mereview anggaran-anggaran mitra kerja utama pada Komisi IX 3. Membuat format form inventarisasi isu dan panduan pengisian form 4. Menyebarkan form daftar inventarisasi isu Komisi IX
Output	Format form inventarisasi isu (lampiran 5)
Tanggal Pelaksanaan	2 Juli 2018-20 Juli 2018
Hambatan	Hambatan pada kegiatan ini adalah format form inventarisasi yang pertama kali dibuat kurang ringkas bagi responden. Terapat beberapa kolom-kolom yang kurang perlu, dan form dapat digabung antara kesehatan dan ketenagakerjaan agar lebih ringkas (lampiran 5 contoh untuk kesehatan)
Solusi	Untuk mengatasi hambatan pada kegiatan ini, pelaksana aktualisasi merubah format form inventarisasi isu APBN Komisi IX menjadi lebih ringkas (lampiran 7).
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Konsultasi dilakukan pada tanggal 2 Juli 2018 dan membahas mengenai hasil pertemuan dengan Ibu Minarni. Pelaksana aktualisasi menjelaskan hasil pertemuan sesuai dengan laporan pada lampiran 3. Atas penjelasan pelaksana aktualisasi, mentor menjelaskan bahwa pelaksana aktualisasi harus melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan dengan Ibu Minarni. Mentor juga meminta pelaksana aktualisasi segera membuat form inventarisasi isu APBN Komisi IX.</p> <p>Tahapan kegiatan ini sesuai dengan Mata Pelatihan Etika Publik dan Akuntabilitas. Hal ini karena konsultasi dengan mentor sesuai dengan norma kesopanan dan sebagai kegiatan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sebelumnya.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 dan 3 – Tahapan kegiatan kedua dan ketiga dilaksanakan segera setelah konsultasi pada tanggal 2 Juli 2018 hingga 13 Juli 2018. Tahapan kegiatan kedua bertujuan untuk menajamkan pemahaman pelaksana aktualisasi mengenai isu-isu mengenai APBN di Komisi IX. Dalam melakukan reviu, pelaksana aktualisasi mengacu pada dokumen-dokumen anggaran mitra kerja Komisi IX yang telah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya.</p> <p>Bersamaan dengan kegiatan kedua, kegiatan ketiga juga dilaksanakan yaitu kegiatan pembuatan format form inventarisasi isu APBN Komisi IX. Lampiran 5 merupakan format awal form inventarisasi isu kesehatan. Namun karena terdapat pertimbangan dari mentor dan pihak Komisi IX, format form diubah menjadi seperti pada lampiran 7. Form inventarisasi isu Komisi IX juga dilengkapi panduan pengisian form agar dapat diisi secara manual oleh pihak-pihak terkait di Komisi IX (Anggota DPR dan Staf Tenaga Ahli).</p> <p>Tahapan kegiatan 2 dan 3 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu dan Manajemen ASN. Hal ini karena pembelajaran mengenai anggaran Komisi IX akan menunjang pemahaman pelaksana aktualisasi sehingga berdampak pada mutu dan peningkatan kualitas diri.</p>

	<p>Tahapan kegiatan 4 – Berdasarkan kesepakatan dengan Ibu Ifa dan Pak Wahab, tahapan kegiatan 4 atau penyebaran form inventarisasi dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juli 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018 pelaksana aktualisasi menemui Ibu Ifa (Koordinator Staf Tenaga Ahli Bidang Kesehatan) di ruang rapat Komisi IX. Pertemuan berlangsung dengan sangat singkat (sekitar 10 menit) karena jadwal rapat Komisi IX yang sangat padat. Hasil dari pertemuan yang dilaksanakan secara informal tersebut adalah bahwa Ibu Ifa meminta pelaksana aktualisasi untuk mengisi form inventarisasi isu terlebih dahulu menurut versi pelaksana aktualisasi. Hal ini agar terbangun pemahaman bersama antara Ibu Ifa dan pelaksana aktualisasi. Ibu Ifa mengusulkan agar setelah pelaksana aktualisasi mengisi form inventarisasi isu APBN Komisi IX, pertemuan kembali dilaksanakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu apa saja yang kedepannya dapat menjadi tema produk Pusat Kajian Anggaran.</p> <p>Tanggal 19 Juli 2018 pelaksana aktualisasi menemui Bapak Wahab (Koordinator Staf Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan) di ruang rapat Komisi IX. Pertemuan berlangsung selama sekitar 45 menit dan membahas mengenai isu APBN dan usulan untuk pola kerja yang baik antara Setjen dan BK DPR RI dengan Staf Tenaga Ahli Komisi IX pada khususnya. Berdasarkan pertemuan dengan Pak Wahab beliau mengharapkan agar kedepannya dalam pengerjaan output analisis APBN dapat melibatkan Staf Tenaga Ahli Komisi IX dengan menjadikan staf tenaga ahli sebagai narasumber. Mengenai pengisian form inventarisasi, Pak Wahab juga meminta pelaksana aktualisasi untuk mengisi form terlebih dahulu sebelum kembali bertemu dengan Pak Wahab untuk membahas form inventarisasi isu. Pak Wahab mengharapkan pengisian form inventarisasi isu dilaksanakan pada sebuah acara <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).</p> <p>Tahapan kegiatan ini sesuai dengan Mata Pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini karena dengan mempelajari anggaran mitra kerja Komisi IX pada periode sebelumnya, akan meningkatkan kualitas mutu output. Selain itu dengan dibuatnya form inventarisasi isu yang dibuat, sesuai dengan mata pelatihan Pelayanan Publik. Hal ini karena dibuatnya form inventarisasi isu merupakan bentuk akomodasi atas keperluan Anggota DPR terkait kebutuhan dukungan fungsi anggaran DPR RI.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Pelaksanaan kegiatan 4 sesuai dengan visi Pusat Kajian Anggaran yang andal. Kontribusi terhadap visi ini terlihat dari tahapan kegiatan 4 yang menitikberatkan pada koordinasi dan integrasi dengan pihak staf tenaga ahli untuk mencapai tujuan Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan fungsi anggaran DPR RI.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Pelaksanaan kegiatan 4 menguatkan nilai profesional pada organisasi Setjen dan BK DPR RI. Dengan adanya kolaborasi yang baik dengan Staf Tenaga Ahli Komisi IX, dapat menunjang dan memperkuat profesionalisme Pusat Kajian Anggaran dalam melaksanakan tugasnya.</p>

Kegiatan 5	Sosialisasi dan Verifikasi Hasil Form
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Pembuatan materi presentasi tentang tusi pusat kajian anggaran 3. Mempresentasikan tusi PKA 4. Wawancara atau tanya jawab mengenai hasil pengisian form
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Media presentasi Produk Pusat Kajian Anggaran (Lampiran 6) - Form inventarisasi isu yang telah terisi (Lampiran 7)
Tanggal Pelaksanaan	23 Juli 2018-17 Agustus 2018
Hambatan	Hambatan pada kegiatan 5 adalah sempat terdapat perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi antara pelaksana aktualisasi dengan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX Bidang Ketenagakerjaan. Pada awalnya Pak Wahab mengira akan ada kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang akan dilaksanakan untuk mempersiapkan pembahasan anggaran kementerian tahun 2019. Namun karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan FGD, pelaksana aktualisasi tidak dapat melaksanakan FGD.
Solusi	Pelaksana aktualisasi menjelaskan bahwa FGD tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Namun kedepannya apabila memungkinkan, FGD dapat dilaksanakan antara Pusat Kajian Anggaran dengan Staf Tenaga Ahli Komisi IX. Pak Wahab dapat menerima penjelasan ini dan meminta bantuan untuk mempersiapkan bahan bagi Komisi IX mengenai anggaran ketenagakerjaan.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Konsultasi dengan mentor pada kegiatan 5 secara spesifik membahas hal-hal apa saja yang hendak dipaparkan pada media penyampaian tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran. Selain itu berdasarkan hasil konsultasi, disepakati bahwa media penyampaian tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran adalah infografis (Lampiran 6). Infografis dipilih agar memudahkan pembaca dalam memilih produk Pusat Kajian Anggaran yang relevan dengan kebutuhannya. Pada saat konsultasi, mentor juga mengingatkan agar pelaksana aktualisasi segera melaksanakan diskusi dengan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini karena apabila terdapat perubahan, perbaikan dapat segera dilakukan tanpa keterbatasan waktu.</p> <p>Tahapan kegiatan 1 sesuai dengan mata pelatihan Etika Publik dan Akuntabilitas. Hal ini karena dengan adanya kegiatan konsultasi, sesuai dengan norma kesopanan dan memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Berdasarkan keputusan konsultasi dengan mentor, diputuskan bahwa infografis adalah media penyampaian mengenai jenis-jenis produk Pusat Kajian Anggaran. Berdasarkan lampiran 6 dapat dilihat jenis-jenis produk Pusat Kajian Anggaran yang dijelaskan oleh pelaksana aktualisasi kepada pembaca. Pelaksana aktualisasi membuat infografis menggunakan aplikasi “canva” dengan referensi deskripsi produk dari situs internet Pusat Kajian Anggaran.</p>

Pembuatan infografis sesuai dengan mata pelatihan **Pelayanan Publik**. Hal ini karena pemilihan infografis sebagai media penyampaian informasi berorientasi kepada pelayanan publik/pemangku kepentingan. Pada awalnya pelaksana aktualisasi berencana untuk membuat presentasi dengan format *power point*, namun pada praktiknya pelaksana aktualisasi menyadari bahwa interaksi dengan komisi harus dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena jadwal komisi yang sangat padat.

Tahapan kegiatan 3 dan 4 – Setelah infografis selesai dibuat, pelaksana aktualisasi segera menyampaikan dan mempresentasikan infografis kepada Staf Tenaga Ahli Komisi IX. Penyampaian infografis ini juga dilakukan bersamaan dengan konfirmasi mengenai isu-isu kesehatan dan ketenagakerjaan yang hendak diusulkan oleh Pak Wahab dan Bu Ifa untuk dijadikan sebagai produk Pusat Kajian Anggaran dan menjadi kebutuhan Komisi IX. Kegiatan 3 dan 4 dilaksanakan secara bersamaan karena keterbatasan waktu Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX. Walaupun Kegiatan 3 dan 4 dilaksanakan secara bersamaan, hal ini tidak merubah agenda pada linimasa kegiatan aktualisasi, karena kegiatan 3 dan 4 dilaksanakan pada periode yang sama dengan apa yang direncanakan pada rancangan aktualisasi. Lampiran 7 merupakan salah satu bukti pertemuan saya dengan Bu Ifa dan Pak Wahab berupa usulan isu berdasarkan hasil diskusi pada pertemuan pertama (pada kegiatan 4).

Pada periode kegiatan ini, pihak pertama yang saya temui adalah Bu Ifa. Pada diskusi yang kami laksanakan (foto pertemuan pada lampiran 8), Bu Ifa mengusulkan 4 isu atau judul topik produk yang dapat dikerjakan oleh Pusat Kajian Anggaran pada waktu yang akan datang. Keempat isu ini menurut Bu Ifa merupakan isu-isu yang harus dikerjakan secara komprehensif pada produk sejenis buku, jurnal, atau analisis. Bu Ifa berpesan agar dalam pelaksanaan penulisan isu ini dapat melibatkan Staf Tenaga Ahli Komisi IX. Menurut Bu Ifa, selama ini Badan Keahlian kurang melibatkan Staf Tenaga Ahli dalam pembuatan produk-produknya, sehingga pembahasan dalam produk kurang komprehensif. Selain itu Bu Ifa mengharapkan suatu produk awal untuk pembahasan Anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX. Produk ini sifatnya berupa pemaparan data yang bersumber dari Nota Keuangan RAPBN 2019 mengenai anggaran kesehatan dan dilengkapi dengan daftar pertanyaan untuk Anggota DPR RI di Komisi IX. Menurut Bu Ifa, daftar pertanyaan merupakan elemen terpenting dalam output untuk pembahasan anggaran kementerian dan lembaga.

Setelah menemui Bu Ifa, pada hari yang berbeda pelaksana aktualisasi menemui Pak Wahab untuk menjelaskan produk Pusat Kajian Anggaran dan meminta penjelasan untuk pengisian form inventarisasi isu APBN pada Komisi IX (foto pertemuan pada lampiran 8). Sesuai dengan penjelasan mengenai hambatan yang telah dipaparkan sebelumnya, pada awalnya terdapat perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Namun setelah pelaksana aktualisasi memberikan penjelasan, Pak Wahab dapat menerima dan memberikan isu yang dapat menjadi produk Pusat Kajian Anggaran. Serupa dengan Bu Ifa, Pak Wahab juga meminta produk berupa pemaparan data yang bersumber dari Nota Keuangan RAPBN 2019 dan sumber-sumber sekunder untuk mendukung pembahasan anggaran ketenagakerjaan dengan kementerian

	<p>dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX. Pak Wahab berpesan bahwa produk yang dibuat tidak perlu lebih dari 10 halaman. Cukup sekitar 5 halaman dan padat data serta dilengkapi pertanyaan untuk Anggota DPR RI Komisi IX.</p> <p>Pelaksanaan tahapan kegiatan 4 sesuai dengan mata pelatihan <i>Whole of Government (WoG)</i> dan Komitmen Mutu. Hal ini karena dengan adanya diskusi mengenai teknis produk yang dapat dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran, mencerminkan komitmen pelaksana aktualisasi untuk mewujudkan mutu yang baik dalam membuat produk Pusat Kajian Anggaran. Dengan pengisian form inventarisasi isu juga menunjukkan pelaksana aktualisasi yang melaksanakan nilai dari mata pelatihan pelayanan publik.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	<p>Pelaksanaan kegiatan 5 berkontribusi pada implementasi visi pusat kajian anggaran yang profesional. Hal ini karena dengan melaksanakan diskusi bersama Koordinator Staf Tenaga Ahli, mewujudkan komitmen pelaksana aktualisasi untuk membuat produk dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar.</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<p>Pelaksanaan kegiatan 5 berkontribusi dalam menguatkan nilai profesional pada organisasi Setjen dan BK DPR RI. Penguatan nilai profesional tercermin dari pelaksanaan pembuatan tugas yang berorientasi dengan kebutuhan Alat Kelengkapan Dewan.</p>

Kegiatan 6	Pengumpulan form data APBN yang dibutuhkan PKA untuk analisis mendatang
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis mendatang 3. Melakukan penyusunan database APBN mitra kerja Komisi IX 4. Membuat produk referensi APBN Ketenagakerjaan Komisi IX 5. Meminta pendapat mengenai isu Komisi IX kepada salah satu Anggota DPR RI
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Potongan gambar <i>folder</i> data APBN mitra kerja Komisi IX (Lampiran 9) - Produk referensi APBN Ketenagakerjaan Komisi IX (Lampiran 10)
Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2018-10 September 2018
Hambatan	Terdapat hambatan berupa sumber data primer yang seringkali diberikan H-1 oleh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX. Kondisi ini juga diakui oleh Anggota DPR RI dan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX.
Solusi	Dalam pembuatan produk, pelaksana aktualisasi menggunakan data primer saat pembahasan pagu indikatif, Nota Keuangan RAPBN 2019, dan sumber data dari BPS. Data-data ini sudah dianggap cukup untuk membuat produk.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan Kegiatan 1 – Konsultasi dan koordinasi dengan mentor pada kegiatan 6 membahas proses pengumpulan dan penyusunan basis data APBN mitra kerja Komisi IX. Mentor berpesan untuk melakukan pengumpulan data dengan tetap berkoordinasi dengan Pak Wahab dan Bu Ifa. Pada kesempatan konsultasi ini pelaksana aktualisasi mengusulkan pembagian tugas kepada mentor. Pembagian tugas yang diusulkan pelaksana aktualisasi adalah, bahwa produk yang diminta oleh Bu Ifa dikerjakan oleh tim pendamping Komisi IX dari Pusat Kajian Anggaran dan produk yang diminta oleh Pak Wahab dikerjakan oleh pelaksana aktualisasi yaitu produk mengenai APBN ketenagakerjaan. Mentor berpesan bahwa produk yang dibuat oleh pelaksana aktualisasi nantinya harus dipresentasikan di Pusat Kajian Anggaran agar diperkaya dengan masukan dan saran yang membangun.</p> <p>Pelaksanaan tahapan kegiatan 1 menunjukkan implementasi dari mata pelatihan Etika Publik dan Akuntabilitas. Hal ini karena konsultasi dengan mentor menunjukkan kesopanan dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.</p> <p>Tahapan Kegiatan 2 – Pengumpulan data terkait anggaran mitra kerja Komisi IX dilakukan pelaksana aktualisasi dengan cara mengumpulkan dokumen presentasi kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX. Pengumpulan dokumen anggaran mitra kerja Komisi IX pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan data anggaran mitra kerja Komisi IX yang disimpan oleh pelaksana aktualisasi. Selain mengumpulkan data yang disimpan oleh pelaksana aktualisasi, data juga dikumpulkan dari rekan Analis APBN yang juga menyimpan data anggaran mitra kerja Komisi IX. Berdasarkan penjelasan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX, data yang didapat oleh Komisi IX</p>

	<p>mengenai APBN terbatas pada data presentasi kementerian dan lembaga saat pembahasan anggaran. Dengan kondisi ini, pelaksana aktualisasi hanya mengumpulkan data presentasi kementerian dan lembaga saat pembahasan anggaran di Komisi IX.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu dan <i>Whole of Government (WoG)</i>. Hal ini karena dengan adanya usaha pengumpulan data yang juga melibatkan rekan Analis APBN yang lain, menumbuhkan sikap bahwa dalam membuat produk yang bermutu baik harus diawali dengan pengumpulan data terutama data primer.</p> <p>Tahapan Kegiatan 3 – Setelah data dikumpulkan dari sumber-sumber yang dijelaskan pada tahapan kegiatan 2, data disimpan pada <i>folder</i> agar kedepannya seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran dapat menggunakan data tersebut dalam pembuatan produk di Pusat Kajian Anggaran. <i>Folder</i> data-data anggaran mitra kerja Komisi IX disimpan pada <i>Flash Drive</i> (Lihat lampiran 9)</p> <p>Tahapan kegiatan 3 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini karena dengan adanya penyimpanan data, memastikan kedepannya pembuatan produk pusat kajian anggaran berbasis data primer dari kementerian dan lembaga terkait. Kondisi ini akan meningkatkan mutu produk Pusat Kajian Anggaran.</p> <p>Tambahan Tahapan Kegiatan 4 – Berdasarkan konsultasi dengan mentor, disepakati bahwa karena adanya permintaan dari Komisi IX, pelaksana aktualisasi membuat 1 produk yang formatnya disesuaikan dengan permintaan Komisi IX (Lampiran 10). Karena adanya tambahan tahapan kegiatan 4, pelaksanaan kegiatan aktualisasi menjadi mundur sekitar 1 minggu namun masih dalam cakupan waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dalam pembuatan produk, pelaksana aktualisasi memberikan judul: “Referensi mengenai Anggaran Ketenagakerjaan dalam Rangka Pembahasan Anggaran TA 2019 di Komisi IX”. Secara umum produk ini membahas isu-isu penting terkait ketenagakerjaan yang diambil dari Nota Keuangan RAPBN 2019, data BPS, data anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, dan sumber-sumber lainnya. Sudut pandang produk ini adalah sudut pandang kritik dari kinerja pemerintah atas pencapaian ketenagakerjaan pemerintah. Produk ini juga dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang dapat digunakan oleh Anggota DPR saat pembahasan anggaran tentang ketenagakerjaan dengan mitra kerja Komisi IX. Pembuatan produk dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus 2018-2 September 2018. Setelah produk selesai dibuat, produk dipresentasikan pada tanggal 4 September 2018 di Pusat Kajian Anggaran. Karena kealpaan, pelaksana aktualisasi tidak mengambil foto kegiatan presentasi namun pelaksana aktualisasi menampilkan potongan gambar percakapan dengan mentor terkait penentuan waktu untuk presentasi (Lampiran 11). Rapat presentasi produk untuk Komisi IX berjalan lancar dengan revisi yang sifatnya minor. Setelah dipresentasikan dan terdapat beberapa perbaikan, pelaksana aktualisasi menyerahkan produk ke Pak Wahab. Pak Wahab memberi tanggapan bahwa pembuatan produk seperti yang telah dibuat oleh pelaksana aktualisasi</p>
--	--

	<p>merupakan awal yang baik, terutama dalam hal pemberian daftar pertanyaan pada produk. Namun menurut Pak Wahab terdapat 1 isu yang sudah pernah dibahas sebelumnya pada rapat Komisi IX yaitu permasalahan <i>mismatch</i> tenaga kerja. Pelajaran atas tahapan kegiatan ini adalah, Analisis APBN yang mendampingi pembahasan anggaran di Komisi IX harus memperkuat komunikasi dengan staf tenaga ahli agar hal yang sudah pernah dibahas dan final pada rapat komisi sebelumnya tidak dibahas lagi pada produk Pusat Kajian Anggaran.</p> <p>Tahapan kegiatan 4 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini karena proses pembuatan analisis dilakukan dengan melaksanakan kegiatan presentasi terlebih dahulu. Kegiatan presentasi merupakan implementasi dari komitmen pelaksana aktualisasi untuk menjaga kualitas mutu produk.</p> <p>Tambahan Tahapan Kegiatan 5 –Pada minggu pertama September, pelaksana aktualisasi berhasil menghubungi kembali salah satu Anggota DPR RI yang pernah didampingi oleh pelaksana aktualisasi pada tahun 2017 yaitu Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si. Pak Irgan merupakan Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pelaksana aktualisasi berhasil menemui Pak Irgan pada tanggal 10 September 2018 di ruang kerja beliau untuk berdiskusi mengenai isu-isu APBN yang dapat dibuatkan produk oleh Pusat Kajian Anggaran (lampiran 12). Seperti yang telah dijelaskan pada tahapan kegiatan sebelumnya, tambahan tahapan kegiatan 5 juga menggeser waktu pengerjaan kegiatan 6. Namun penambahan tahapan kegiatan ini masih dalam waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dalam pertemuan dengan Pak Irgan, beliau memberikan 2 isu yang dapat dibuatkan produknya oleh Pusat Kajian Anggaran mengenai anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan.</p> <p>Tahapan kegiatan 5 sesuai dengan mata pelatihan Pelayanan Publik dan Nasionalisme. Hal ini karena pelaksana aktualisasi secara langsung menemui Anggota DPR RI untuk mengakomodir kebutuhannya. Tahapan kegiatan ini juga menumbuhkan sikap nasionalisme karena berinteraksi langsung dengan pejabat negara yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Kegiatan 6 berkontribusi untuk mewujudkan visi Pusat Kajian Anggaran yang andal. Hal ini karena kegiatan 6 menunjukkan pola kerja kolaboratif dalam mendukung fungsi anggaran DPR RI
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan 6 memberikan penguatan nilai profesional pada organisasi. Hal ini karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Anggota DPR RI, artinya menunjukkan perilaku profesional dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan 7	Penyusunan Laporan Kegiatan
Tahapan Kegiatan	1. Melakukan koordinasi dengan mentor 2. Melakukan rekapitulasi lampiran output 3. Melakukan penulisan laporan 4. Melakukan pencetakan laporan
Output	Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi (Lampiran 13)
Tanggal Pelaksanaan	12 September 2018-30 September 2018
Hambatan	Terdapat hambatan berupa bentrohnya pengerjaan laporan aktualisasi dengan pekerjaan primer pelaksana aktualisasi di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
Solusi	Cara mengatasi hambatan ini adalah dengan pembagian waktu yang baik agar seluruh pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><i>Tahapan kegiatan 1</i>– Sesuai dengan target waktu pada rancangan aktualisasi, pelaksana aktualisasi berkonsultasi dengan mentor tetap pada minggu pertama September untuk pembuatan laporan aktualisasi. Mentor menyarankan agar dalam pembuatan laporan aktualisasi, pelaksana aktualisasi berkonsultasi juga dengan coach. Mentor juga menyarankan untuk memasukkan kegiatan pembuatan produk Pusat Kajian Anggaran dan kegiatan diskusi dengan anggota DPR RI sebagai tambahan tahapan kegiatan pada laporan aktualisasi. Sesuai dengan instruksi mentor, pelaksana aktualisasi menemui coach bersama kelompok coaching pada Jumat, 21 September 2018.</p> <p>Tahapan kegiatan 1 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu dan Etika Publik. Hal ini karena dengan adanya konsultasi bersama mentor dan coach, memastikan laporan aktualisasi sesuai dengan format dan ketentuan yang disyaratkan oleh coach. Tahapan kegiatan ini juga sesuai dengan norma kesopanan kepada pembimbing.</p> <p><i>Tahapan kegiatan 2</i>– Lampiran output dan <i>evidence</i> adalah bukti yang penting atas kegiatan aktualisasi. Secara umum output utama pada kegiatan aktualisasi ini adalah form inventarisasi isu APBN Komisi IX yang diisi oleh pemangku kepentingan Komisi IX. Output telah disimpan dan dipersiapkan dengan baik oleh pelaksana aktualisasi, sehingga pada proses pengumpulan output dan <i>evidence</i>, pelaksana aktualisasi tidak mengalami kesulitan yang berarti.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 sesuai dengan mata pelatihan Akuntabilitas dan Anti Korupsi. Hal ini karena dengan adanya bukti pelaksanaan kegiatan aktualisasi, kegiatan aktualisasi menjadi andal dan valid. Rekapitulasi output dan <i>evidence</i> yang sesuai dengan kenyataan kegiatan juga menggambarkan nilai anti korupsi.</p> <p><i>Tahapan kegiatan 3</i>– Penulisan laporan dimulai bersamaan dengan kegiatan 2. Penulisan laporan aktualisasi mengikuti format yang diusulkan oleh coach. Sesuai dengan arahan mentor dan coach, seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dicantumkan pada laporan pelaksanaan aktualisasi.</p> <p>Serupa dengan tahapan kegiatan 2, tahapan kegiatan 3 juga sesuai dengan mata pelatihan Nasionalisme. Hal ini karena penulisan laporan berdasarkan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan nilai Nasionalisme.</p>

	<p>Tahapan kegiatan 4– Pencetakan laporan aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018. Hal ini karena pelaksana aktualisasi menunggu arahan akhir dari coach mengenai hal-hal yang harus dievaluasi dari penulisan laporan kegiatan aktualisasi.</p> <p>Pelaksanaan tahapan kegiatan 4 sesuai dengan mata pelatihan Komitmen Mutu. Hal ini karena pelaksana aktualisasi menunggu arahan dari coach untuk memastikan apa yang telah ditulis oleh pelaksana aktualisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan coach.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Kegiatan 7 secara eksplisit merupakan kegiatan yang berkontribusi untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang Akuntabel. Hal ini karena dengan adanya laporan kegiatan aktualisasi merupakan bukti konkret pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan aktualisasi
Penguatan Nilai Organisasi	Selaras dengan kontribusi terhadap tujuan organisasi, kegiatan 7 memberikan penguatan atas nilai akuntabilitas pada organisasi Setjen dan BK DPR RI. Penguatan ini menjadi hal yang penting karena menjadi catatan penting bukan hanya untuk pelaksana aktualisasi, namun untuk Pusat Kajian Anggaran.

B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

[illegible]

BAGIAN IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi “Inventarisasi Isu Sebagai Sarana Optimalisasi Koordinasi Pusat Kajian Anggaran Dengan Komisi IX DPR RI” telah selesai dilaksanakan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi pelaksana aktualisasi. Selama waktu 23 Mei-30 September 2018, 7 kegiatan telah terlaksana dengan baik dan telah terimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai pada mata pelatihan. Untuk merangkum pembelajaran dan nilai-nilai yang didapat pelaksana aktualisasi, berikut hal-hal yang dirangkum pelaksana aktualisasi selama masa habituasi:

1. Kegiatan pertama adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan seperti akuntabilitas dan etika publik. Pembelajaran utama yang didapatkan pelaksana aktualisasi adalah pentingnya koordinasi dengan pimpinan dalam setiap tindakan dan kegiatan.
2. Kegiatan kedua adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan seperti komitmen mutu, pelayanan publik, dan akuntabilitas. Pembelajaran utama yang didapatkan pelaksana aktualisasi adalah pentingnya untuk menguasai isu-isu kontemporer pada suatu komisi.
3. Kegiatan ketiga adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan seperti etika publik, akuntabilitas, dan *whole of government*. Pembelajaran utama yang didapatkan pelaksana aktualisasi adalah bahwa dalam menyelesaikan tugas di DPR RI, tidak harus melalui menggunakan sarana formal. Sarana informal juga memiliki pengaruh yang besar untuk penyelesaian tugas.
4. Kegiatan keempat adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan seperti komitmen mutu dan pelayanan publik. Pembelajaran utama yang didapatkan pelaksana aktualisasi adalah bahwa pada praktiknya, produk Pusat Kajian Anggaran harus diuji terlebih dahulu kepada pengguna agar dapat diketahui kekurangan produk dan dapat diperbaiki kualitasnya.
5. Kegiatan kelima adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan seperti komitmen mutu dan pelayanan publik. Pembelajaran utama yang

didapatkan pelaksana aktualisasi adalah bahwa dalam mengerjakan tugas, Pusat Kajian Anggaran harus dapat menggunakan segala cara yang efektif untuk menghasilkan produk yang baik dalam waktu yang singkat.

6. Kegiatan keenam adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan seperti komitmen mutu dan etika publik. Pembelajaran utama yang didapatkan pelaksana aktualisasi adalah bahwa hal utama yang harus menjadi orientasi pegawai Setjen dan BK DPR RI adalah memberikan pelayanan terbaik kepada Anggota DPR RI.
7. Kegiatan ketujuh adalah kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai pada mata pelatihan seperti Komitmen Mutu dan Akuntabilitas. Pembelajaran utama yang didapatkan pelaksana aktualisasi adalah bahwa jejak langkah perbaikan harus dapat tercatat dengan baik dan harus tetap diimplementasikan pada masa-masa yang akan datang.

Tantangan Pusat Kajian Anggaran untuk memberikan dukungan terbaik dalam fungsi anggaran DPR RI masih besar. Pusat Kajian Anggaran harus lebih aktif dalam membangun komunikasi yang baik dengan komisi-komisi di DPR RI. Komunikasi yang baik sangat penting agar Pusat Kajian Anggaran mendapatkan data dan isu kontemporer yang benar-benar sedang menjadi bahasan di komisi terkait. Selain itu komunikasi yang terbangun baik dapat menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai penunjang utama fungsi anggaran DPR RI.

B. Saran

Pelaksana aktualisasi sangat menyarankan agar Pusat Kajian Anggaran membangun pola komunikasi seperti yang telah dilaksanakan oleh pelaksana aktualisasi kepada komisi-komisi lain. Selain itu Pusat Kajian Anggaran dapat menggunakan cara-cara non-formal untuk memberikan produknya kepada anggota-anggota yang dianggap vokal pada saat rapat. Hal ini untuk menjadikan produk yang dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran semakin berdampak luas dan memperkuat fungsi anggaran DPR RI. Kedepannya Pusat Kajian Anggaran juga dapat mempresentasikan produknya kepada pimpinan-pimpinan Alat Kelengkapan Dewan agar antusiasme Anggota DPR terhadap output Pusat Kajian Anggaran semakin tinggi.

C. Rencana Tindak Lanjut

Terkait tindak lanjut pelaksanaan kegiatan aktualisasi, pelaksana aktualisasi merencanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bersama dengan jajaran Pusat Kajian Anggaran, saya akan membuat formulasi produk baru yang dikhususkan untuk mengawal rapat pembahasan anggaran di komisi
2. Bersama dengan jajaran Pusat Kajian Anggaran, saya akan mengerjakan output terkait Komisi IX yang isunya sudah terkumpul melalui kegiatan aktualisasi
3. Bersama dengan jajaran Pusat Kajian Anggaran, saya akan membangun jaringan komunikasi formal dan informal pada komisi-komisi lain dan menjaga pola komunikasi yang baik pada Komisi IX.

LAMPIRAN 1

*Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan
(SKMK)*



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
(021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR: BK/ /SETJEN DAN BK DPR RI/PA/0 /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fajri Ramadhan, S.E.
NIP : 199402232018011003
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 28 Mei 2018 – 30 September 2018. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan berjudul: **"Inventarisasi Isu Sebagai Sarana Optimalisasi Koordinasi Pusat Kajian Anggaran Dengan Komisi IX DPR RI"** dengan jumlah output yaitu: 1 (satu) pangkalan data isu Komisi IX, 1 (satu) pangkalan data APBN mitra kerja Komisi IX, dan 1 (satu) referensi data APBN Komisi IX.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 31 Mei 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005

LAMPIRAN 2

Rencana Kegiatan Aktualisasi untuk Komisi IX

**RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI
INVENTARISASI ISU SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI
KOORDINASI PUSAT KAJIAN ANGGARAN DENGAN
KOMISI IX DPR RI**

**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN I TAHUN 2018**



Disusun Oleh:

NAMA : FAJRI RAMADHAN, S.E.

NIP : 199402232018011003

JABATAN : CALON ANALIS APBN AHLI PERTAMA

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2018

BAGIAN I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Organisasi/Unit Kerja

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN
- b. Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan APBN
- d. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Dalam mendukung fungsi anggaran tersebut, DPR RI didukung oleh Badan Keahlian DPR RI sebagai lembaga pendukung (*supporting system*) DPR RI. Sebagai lembaga pendukung yang bertugas mendukung fungsi utama DPR RI, Badan Keahlian didukung oleh 5 unit eselon II yaitu: Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian.

Terkait fungsi anggaran, DPR RI didukung oleh Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, PKA memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PKA memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- f) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
- g) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
- h) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;

- i) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- j) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- k) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Berdasarkan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pusat kajian Anggaran, Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan tugas dan fungsi dari Bagian Analisa APBN pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Setelah Badan Keahlian terbentuk pada tahun 2015, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN berubah menjadi Pusat Kajian Anggaran di bawah Badan Keahlian DPR RI. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran memiliki visi dan misi sebagai berikut:

➤ **Visi**

- Pusat Kajian Anggaran yang professional: mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
- Pusat Kajian Anggaran yang andal: mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel: mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

➤ **Misi**

- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- Memperkuat manajemen pengetahuan.
- Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN

B. Jabatan Peserta

Jabatan Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.39 Tahun 2014. Berdasarkan aturan tersebut, yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan

analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas ruang lingkup jabatan tersebut, Analis APBN Ahli Pertama memiliki 4 tugas utama yaitu:

1. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD. Analisis yang dilakukan dengan prosedur: penentuan tema, pengumpulan data awal, penentuan *outline*, penulisan analisis, diskusi dengan pakar, perbaikan analisis, presentasi analisis, dan mendokumentasikan hasil analisis
2. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim. Penulisan referensi dilakukan dengan prosedur: penyusunan draft referensi, diskusi referensi dengan pakar, melakukan perbaikan referensi, menyelenggarakan presentasi referensi, dan mendokumentasikan hasil referensi
3. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC) secara individual, sebagai anggota atau ketua tim. Penulisan ARC dilakukan dengan prosedur: penyusunan analisis, presentasi ARC dengan pakar, dan melakukan dokumentasi hasil ARC
4. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC sebagai penyaji, pakar, pembahas, moderator, dan peserta/anggota diskusi.

BAGIAN II. DESKRIPSI ISU

A. Belum Optimalnya Koordinasi Antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)

Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016, diketahui bahwa jenis layanan dengan skor terendah dalam hal kepuasan adalah Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan (skor: 71,98) dan Kemudahan mendapatkan layanan (skor: 71,60). Secara mendalam, survey ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan nilai terendah pada jenis-jenis layanan Badan Keahlian DPR RI yaitu:

- a. Banyak anggota yang tidak menerima produk BK DPR RI, perlu ada yang bertanggung jawab terhadap pendistribusiannya
- b. Terbitkan hasil penelitian yang sesuai dengan pembahasan di DPR RI, cepat dan mudah di akses

Atas kondisi ini dan testimoni Analis APBN, perlu adanya penguatan koordinasi dengan Anggota DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. Penguatan koordinasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dan produk yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan Anggota DPR RI. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan bahwa produk yang dikerjakan Badan Keahlian DPR RI, khususnya PKA tidak relevan dengan kebutuhan Anggota DPR RI.

Komisi IX menjadi pilihan penulis karena berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 terdapat anggaran yang sifatnya wajib atau *mandatory* yaitu anggaran kesehatan. Besaran anggaran kesehatan berdasarkan undang-undang tersebut adalah 5 persen dari total belanja negara. Selain anggaran kesehatan pada Komisi IX yang sifatnya strategis, penulis memilih Komisi IX karena mentor dan penulis pernah ditugaskan untuk melakukan pendampingan pembahasan APBN di Komisi IX. Hal ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah untuk mempermudah pengerjaan aktualisasi.

BAGIAN III. PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN

Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
 Isu yang Diangkat : Belum optimalnya koordinasi antara PKA dengan Anggota DPR RI (Komisi IX)
 Gagasan terpilih adalah : Inventarisasi Isu dan Data APBN Komisi IX

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterangan Teknis
1.	2.	3.	4.	7.
1.	Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX perihal linimasa program	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mencari kontak sekretariat komisi IX 3. Menghubungi kontak sekretariat komisi IX untuk menentukan waktu pertemuan 4. Bertemu dengan kontak sekretariat komisi IX untuk memaparkan agenda program 5. Membuat database kontak tenaga ahli komisi	- Dokumen laporan kegiatan pertemuan - Dokumentasi foto pertemuan	1. Setelah menghubungi kontak Sekretariat Komisi IX, pelaksana kegiatan menyerahkan dokumen perencanaan kegiatan dan menjelaskan teknis kegiatan pada Sekretariat Komisi IX 2. Dalam pertemuan ini pelaksana menjelaskan bahwa terdapat minimal 2 pertemuan lagi dengan Sekretariat Komisi IX dan atau TA Pimpinan atau Anggota Komisi IX 3. Meminta database tenaga ahli Komisi IX dan atau tenaga ahli Anggota Komisi IX
2.	Membuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor	Format form inventarisasi isu	1. Membuat form inventarisasi isu yang nantinya form ini akan diisi minimal oleh tenaga ahli komisi dan tenaga ahli pimpinan Komisi IX

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterangan Teknis
1.	2.	3.	4.	7.
	IX dan panduan pengisian form	2. Mereview anggaran-anggaran mitra kerja utama pada komisi IX 3. Membuat format form inventarisasi isu dan panduan pengisian form 4. Menyebarkan form daftar inventarisasi isu komisi IX		2. Format form dapat dikonsultasikan langsung dengan Sekretariat Komisi IX dan terbuka untuk kritik dan saran 3. Setelah format form sudah <i>fixed</i> form akan disebarakan kepada TA Komisi IX dan TA Pimpinan. Apabila kondisi memungkinkan, form juga akan disebarakan kepada pihak-pihak lain yang dianggap perlu 4. Pembuatan dan penyebaran form mengacu pada linimasa yang telah dibuat.
3.	Sosialisasi dan Verifikasi hasil form	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Pembuatan materi presentasi tentang tusi pusat kajian anggaran 3. Mempresentasikan tusi PKA 4. Wawancara atau tanya jawab mengenai hasil pengisian form	- Media presentasi tusi PKA - Form isu yang telah terisi	1. Materi yang dibuat dalam bentuk <i>power point</i> yang tidak lebih dari 10 slide 2. Proses presentasi tusi PKA dan wawancara verifikasi hasil form diupayakan untuk dilaksanakan dalam satu pertemuan besar dengan seluruh TA Komisi IX dan TA Pimpinan Komisi IX 3. Presentasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada TA mengenai tugas dan fungsi PKA. Sehingga TA dapat meminta bantuan kepada PKA dalam tugas-tugas terkait penyusunan APBN
4.	Pengumpulan form data APBN yang dibutuhkan PKA untuk analisis mendatang	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis mendatang 3. Melakukan penyusunan database data APBN mitra kerja komisi IX	- Dokumen data APBN mitra kerja Komisi IX - Produk Referensi data komisi IX	1. Berdasarkan analisis form yang telah diisi pelaksana mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat produk PKA yang diperlukan bagi Komisi IX 2. Data yang telah didapatkan dari Sekretariat Komisi IX akan dikumpulkan dalam sebuah database dan dapat digunakan untuk PKA pada masa yang akan datang 3. Data yang telah dikumpulkan akan dibuatkan produk referensi dengan tema tertentu

BAGIAN VII.

JADWAL KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN 3

Laporan Kegiatan Pertemuan

Laporan Pertemuan Koordinasi dengan Komisi IX

Peserta : Minarni, S.H. dan Fajri Ramadhan, S.E.
Tanggal : 29 Juni 2018
Waktu : 14.00-14.30
Tempat : Ruang Sekretariat Komisi IX

CATATAN/KESIMPULAN:

1. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX bersedia untuk ikut serta pada kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Fajri Ramadhan, S.E. Kegiatan aktualisasi berjudul: "Inventarisasi Isu Sebagai Sarana Optimalisasi Koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan Komisi IX DPR RI".
2. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX meminta agar rancangan aktualisasi dikirimkan kepada beliau melalui media elektronik
3. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX menugaskan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan untuk membantu pelaksanaan kegiatan aktualisasi.

LAMPIRAN 4

*Potongan gambar percakapan dengan
KabagSet Komisi IX*

**Ibu Minarni Komisi 9**

online



13.31

Fri, 29 Jun

Asaalamualaikum Bu Minarni. Saya Fajri Ramadhan Analis APBN BK DPR RI, izin tanya Bu, apakah hari ini jam stgh 11 siang Ibu ada di kantor? Melalui pesan ini, saya dan Pak Slamet Widodo (Analis APBN) hendak menemui Ibu untuk diskusi mengenai APBN pada mitra kerja komisi 9. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih Bu. 🙏

09.31 ✓✓

Abis jum'atan aj ya
Sy lg diluar ktr

09.36

Siap baik bu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya bu 🙏

09.36 ✓✓

Ok 🙏

09.38

Maaf bu izin tanya, apakah nanti Pak Slamet dan saya dapat menemui Ibu jam stgh 2 di Komisi 9 ya Bu? Terima kasih banyak Bu 🙏

12



Thu, 12 Jul

Assalamualaikum Bu, mohon maaf



LAMPIRAN 5

*Format awal form inventarisasi isu
(Contoh: Isu Kesehatan)*

Form Inventarisasi Isu Komisi IX

Unit Kerja	: Pusat Kajian Anggaran
Tujuan Pembuatan Form	: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pelayanan kepada Komisi IX DPR RI2. Meningkatkan kualitas dan relevansi produk Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dengan kebutuhan Komisi IX DPR RI3. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dan Komisi IX DPR RI
Panduan Pengisian Form	: <ol style="list-style-type: none">1. Form terdiri atas 3 bagian tabel yang dibagi berdasarkan jangka waktu isu yaitu: jangka pendek (kurang dari 1 tahun, 1 sampai 3 tahun dan lebih dari 3 tahun)2. Tabel terdiri dari 6 kolom yaitu Nomor, Isu, Jenis Isu, Ketersediaan data, output yang diharapkan, dan keterangan tambahan3. Kolom Isu diisi dengan hal-hal yang menjadi isu pada Komisi IX yang terkait dengan analisis APBN. Isu yang dicantumkan dapat mencakup isu pada kementerian/lembaga secara umum yang menjadi <i>counterpart</i> Komisi IX atau suatu kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah4. Kolom Jenis Isu diisi dengan detil isu pada kolom isu. Jenis isu terdapat 2 jenis yaitu isu kesehatan dan isu ketenagakerjaan. Kolom isu juga dapat diisi oleh isu-isu lain yang masih terkait dengan cakupan kerja Komisi IX5. Kolom ketersediaan data diisi dengan kondisi ketersediaan data terkait isu. Data yang dimaksud pada kolom bertujuan untuk mempermudah pembuatan output oleh pusat kajian anggran6. Kolom output yang diharapkan diisi dengan jenis output pusat kajian anggaran. Secara umum terdapat beberapa jenis output seperti:<ol style="list-style-type: none">a. Buku: bentuk tulisan dengan jumlah halaman minimal 50 halaman mengenai suatu tema tertentu yang dibahas secara komprehensifb. Analisis: bentuk tulisan dengan jumlah halaman maksimal 12 halaman mengenai suatu tema tertentu yang dibahas secara umumc. Referensi: bentuk tulisan dengan jumlah halaman maksimal 15 halaman yang memaparkan data-data mengenai suatu topik tertentu7. Kolom keterangan tambahan diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperkuat penjelasan atas kolom-kolom lain
Contact Person	: Fajri Ramadhan (081381923273)

I. Isu Jangka Pendek (kurang dari 1 tahun)

No	Isu	Jenis Isu (Kesehatan/Ketenagakerjaan/Lain-lain)	Ketersediaan data dari kementerian/Lembaga terkait (Ada/Tidak)	Output yang diharapkan	Keterangan Tambahan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Isu Dukungan APBN dalam pencegahan penyakit (vaksin)	Isu Kesehatan		Buletin	Karena isu vaksin kembali mencuat, buletin APBN dapat dibuat untuk memberikan revid singkat dukungan APBN dalam pengadaan vaksin. Buletin juga bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan vaksin dalam mencegah penularan penyakit-penyakit tertentu
2					
3					
4					

No	Isu	Jenis Isu (Kesehatan/Ketenagakerjaan/Lain-lain)	Ketersediaan data dari kementerian/Lembaga terkait (Ada/Tidak)	Output yang diharapkan	Keterangan Tambahan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5					

II. Isu Jangka Menengah (1 sampai 3 tahun)

No	Isu	Jenis Isu (Kesehatan/Ketenagakerjaan/Lain-lain)	Ketersediaan data dari kementerian/Lembaga terkait (Ada/Tidak)	Output yang diharapkan	Keterangan Tambahan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Target RPJMN prevalensi merokok penduduk usia dibawah 18 tahun yang belum tercapai pada tahun 2016 dan 2017	Isu Kesehatan		Analisis	Isu ini menjadi penting karena selama 2 tahun berturut-turut target RPJMN ini belum tercapai. Pembahasan isu mencakup minimal dukungan anggaran dari ditjen P2P Kementerian Kesehatan dan kendala yang dialami Kementerian Kesehatan.
2	Target RPJMN prevalensi obesitas pada penduduk usia diatas 18 tahun	Isu Kesehatan		Analisis	Isu ini menjadi penting karena selama 2 tahun berturut-turut

No	Isu	Jenis Isu (Kesehatan/Ketenagakerjaan/Lain-lain)	Ketersediaan data dari kementerian/Lembaga terkait (Ada/Tidak)	Output yang diharapkan	Keterangan Tambahan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	yang belum tercapai pada tahun 2016 dan 2017				target RPJMN ini belum tercapai. Pembahasan isu mencakup minimal dukungan anggaran dari ditjen P2P Kementerian Kesehatan dan kendala yang dialami Kementerian Kesehatan.
3					
4					
5					

III. Isu Jangka Panjang (lebih dari 3 tahun)

No	Isu	Jenis Isu (Kesehatan/Ketenagakerjaan/Lain-lain)	Ketersediaan data dari kementerian/Lembaga terkait (Ada/Tidak)	Output yang diharapkan	Keterangan Tambahan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Evaluasi penggunaan dana Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kualitas kesehatan Indonesia	Isu Kesehatan		Buku	Kebijakan Cukai utamanya merupakan alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan mengkompensasi eksternalitas negatif. Isu ini perlu diangkat untuk mendalami kebijakan CHT dan pengaruhnya untuk mengkompensasi eksternalitas negatif akibat rokok.
2	Pembuatan form database detail program kerja <i>counterpart</i> Komisi IX	Isu Kesehatan		Database	Database ini merupakan pengembangan dari database yang telah dikembangkan Pusat Kajian Anggaran.
3	Evaluasi 5 tahun BPJS Kesehatan	Isu Kesehatan		Buku	Sebagai program perlindungan sosial universal, BPJS Kesehatan berperan penting dalam menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. Evaluasi akan dititikberatkan pada performa keuangan, performa operasional, dan indikator-indikator lainnya yang relevan.
4					

No	Isu	Jenis Isu (Kesehatan/Ketenagakerjaan/Lain-lain)	Ketersediaan data dari kementerian/Lembaga terkait (Ada/Tidak)	Output yang diharapkan	Keterangan Tambahan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5					

LAMPIRAN 6

*Media presentasi produk Pusat Kajian
Anggaran*

Produk-produk Pusat Kajian Anggaran

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Sekilas tentang Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran adalah salah satu pusat pada Badan Keahlian DPR RI. Pusat ini mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam mendukung tugasnya, Pusat Kajian Anggaran dibagi menjadi 4 bidang sesuai struktur APBN yaitu: 1) Bidang Perencanaan dan Asumsi Ekonomi Makro; 2) Bidang Belanja Pemerintah Pusat; 3) Bidang Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan 4) Bidang Pendapatan dan Pembiayaan



Produk Analisis APBN

Analisis APBN adalah tulisan dengan tema tertentu sesuai dengan siklus APBN. Siklus APBN yang termasuk dalam cakupan analisis adalah siklus pembicaraan pendahuluan, siklus APBN induk dan analisis lintas bidang.



Produk Analisis Ringkas Cepat

Analisis Ringkas Cepat (ARC) adalah tulisan dengan tema tertentu sesuai permintaan Anggota DPR RI dan rapat-rapat AKD yang bersifat penting. Analisis dibuat dalam waktu 1-2 hari kerja dengan jumlah 1-2 halaman.



Produk Referensi

Referensi adalah produk tulisan kumpulan data dengan tema tertentu. Perbedaan antara produk ini dengan Analisis APBN adalah produk ini lebih menitikberatkan pemaparan tren data, sementara Analisis APBN menitikberatkan pendalaman analisis.



Produk Buku

Buku adalah produk tulisan mengenai suatu tema yang dibahas secara komprehensif. Buku yang dibuat umumnya berdasarkan data primer yang didapat Pusat Kajian Anggaran melalui tinjauan lapangan ke daerah



Produk Buletin

Buletin adalah produk tulisan mengenai ekonomi atau APBN yang sifatnya kontemporer. Buletin disusun dalam jangka waktu 1-2 minggu dengan kisaran 2000 kata.



Produk Lain-Lain

Selain produk-produk yang disebutkan diatas, terdapat beberapa produk lain yang menjadi output Pusat Kajian Anggaran seperti Jurnal, Infografis, dan basis data APBN. Basis data APBN kedepannya akan mencakup sistem simulasi informasi APBN, sehingga DPR akan memiliki APBN perbandingan versi Anggota DPR.




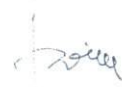


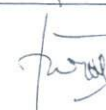
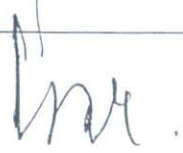
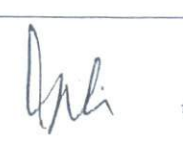
LAMPIRAN 7

*Form inventarisasi isu final yang telah
terisi*

Rekapitulasi Isu APBN Komisi IX

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan diskusi dengan pihak-pihak terkait di Komisi IX, terdapat beberapa isu yang kedepannya dapat menjadi tema produk Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI sebagai berikut:

No	Isu	Jenis Isu (Kesehatan/Ketenagakerjaan/Lain-lain)	Pengusul	Tanda Tangan Pengusul
1	Indikator ketenagakerjaan dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan pada Pagu Indikatif dan RAPBN 2019	Isu Ketenagakerjaan	Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang ketenagakerjaan	
2	Komparasi target kinerja mengenai penyebaran penyakit (target utamanya pada Ditjen P2P) dengan SDGs.	Isu Kesehatan	Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan	
3	Rekapitulasi data anggaran Kementerian Kesehatan pada tingkat kegiatan hingga aktivitas utama	Isu Kesehatan	Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan	
4	Penggunaan Cukai Hasil Tembakau untuk anggaran kesehatan	Isu Kesehatan	Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan	
5	Evaluasi kinerja BPJS Kesehatan	Isu Kesehatan	Staf Tenaga Ahli Komisi IX bidang kesehatan	
6	Evaluasi TKN ↳ Pembayaran Charge ke ekonomian	Isu Kesehatan	Drs. H. Irgun Chairul Mahfiz, M. Si Anggota DPR RI Komisi IX (No. Anggota: 535)	
7	Dukungan APBN untuk peningkatan kompetensi SDM. Untuk daerah dan Luar Negeri	Isu Ketenagakerjaan	Drs. H. Irgun Chairul Mahfiz, M. Si. Anggota DPR RI Komisi IX (No. Anggota: 535)	
8				

LAMPIRAN 8

*Foto Pertemuan Dengan Koordinator Staf
Tenaga Ahli Komisi IX*



Pertemuan Pelaksana Aktualisasi dengan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX Bidang Ketenagakerjaan



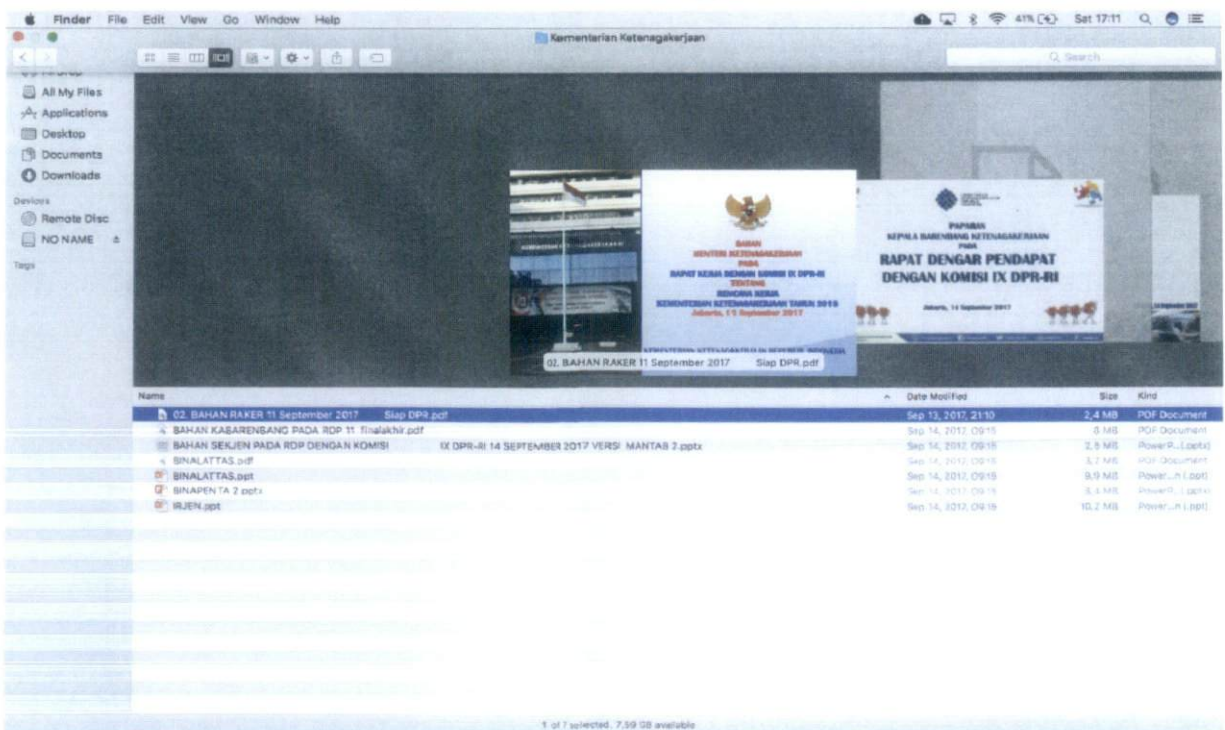
Pertemuan Pelaksana Aktualisasi dengan Koordinator Staf Tenaga Ahli Komisi IX Bidang Kesehatan

LAMPIRAN 9

Folder data anggaran Komisi IX



Tampilan Folder Data Anggaran Komisi IX



Tampilan Data-Data pada Folder Data Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan

LAMPIRAN 10

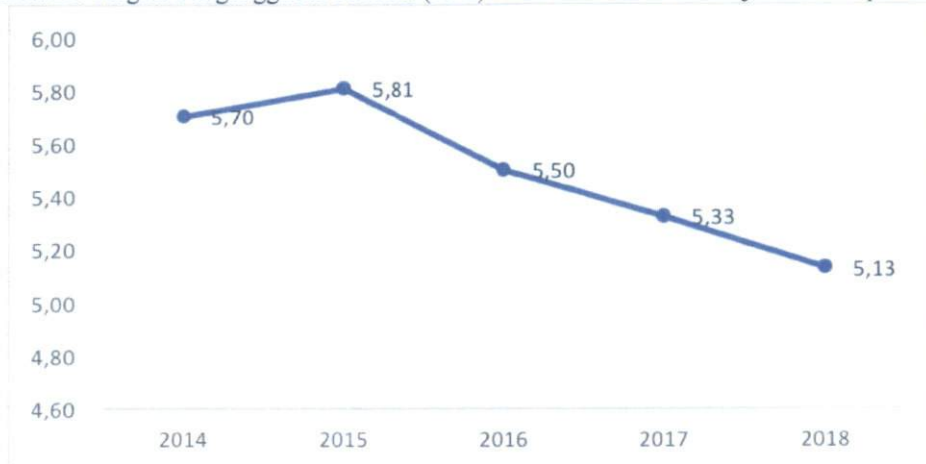
*Produk referensi anggaran
ketenagakerjaan Komisi IX*

Referensi mengenai Anggaran Ketenagakerjaan dalam Rangka Pembahasan Anggaran TA 2019 di Komisi IX

I. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada bulan Februari 2018 adalah sebesar 5,13 persen atau sebesar 6,87 juta orang. Sesuai dengan gambar 1, TPT menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2015 dan angka TPT pada Februari tahun 2018 merupakan angka TPT terendah selama 5 tahun terakhir.

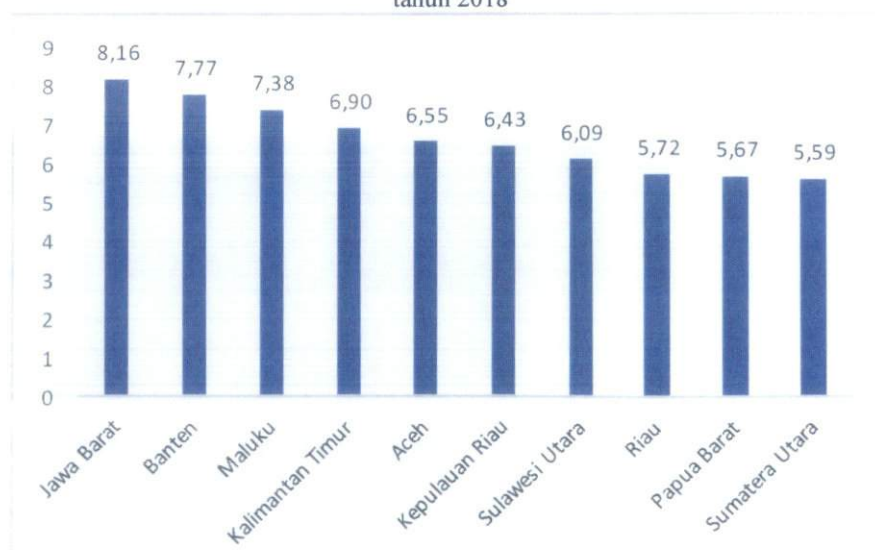
Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014-2018 menunjukkan tren penurunan



Sumber: BPS (2018)

Pencapaian angka TPT pada tahun 2018 harus semakin baik pada tahun-tahun kedepan. Selain itu pemerintah harus memperhatikan dan melakukan intervensi kebijakan pada provinsi-provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi diatas angka TPT nasional. Gambar 2 menunjukkan 10 provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi.

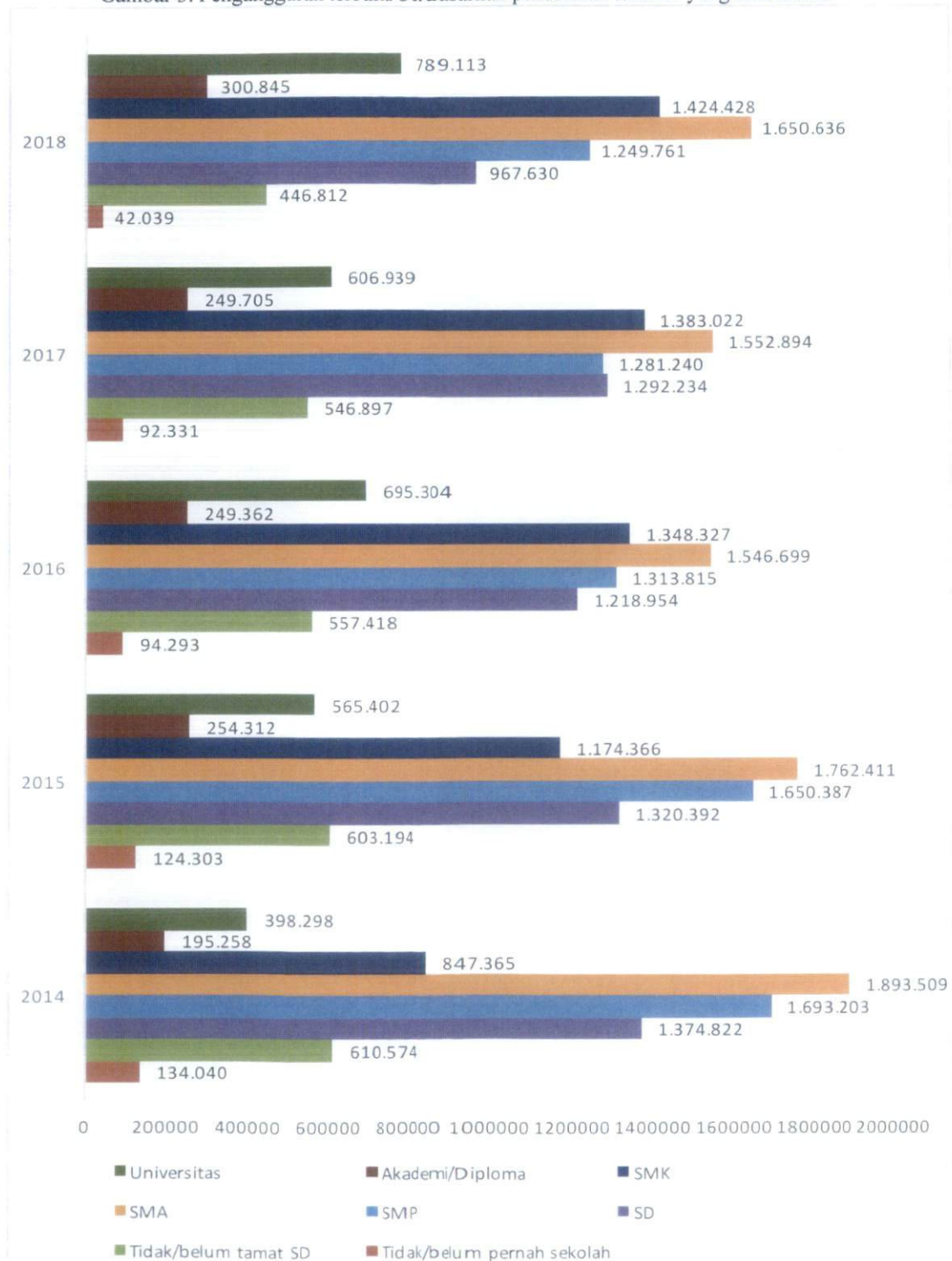
Gambar 2. 10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diatas angka TPT nasional pada tahun 2018



Sumber: BPS (2018)

Selain harus memperhatikan provinsi-provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi, pemerintah harus memastikan penurunan TPT berkualitas. Hal ini dengan memastikan turunnya tingkat pengangguran pada lulusan pendidikan menengah hingga tinggi. Gambar 3 menunjukkan bahwa penurunan TPT pada tahun 2018 hanya terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan SMP, SD, dan belum pernah sekolah.

Gambar 3. Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan



Sumber: BPS (2018)

II. Tantangan ketenagakerjaan Indonesia

Pada Nota Keuangan RAPBN 2019, Pemerintah mengidentifikasi 3 tantangan ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4:

Gambar 4. Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019

Atas 3 tantangan ketenagakerjaan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah:

- Mengenai kebijakan peningkatan *skill* tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, ILO (2017) menyimpulkan bahwa terdapat indikasi permasalahan ketidaksesuaian antara kemampuan pekerja dan pekerjaan (*mismatch*) yang semakin meningkat di Indonesia. Atas permasalahan ini, diketahui bahwa terdapat tren peningkatan jumlah pekerja berpendidikan dibawah kualifikasi pekerjaan (*undereducation*) dan penurunan jumlah pekerja berpendidikan diatas kualifikasi pekerjaan (*overeducation*) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1. Pembagian Tingkat Pendidikan Pekerja berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi kerja

Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Perkotaan		Perdesaan	
	Pendidikan diatas rata-rata	Pendidikan dibawah rata-rata	Pendidikan diatas rata-rata	Pendidikan dibawah rata-rata	Pendidikan diatas rata-rata	Pendidikan dibawah rata-rata	Pendidikan diatas rata-rata	Pendidikan dibawah rata-rata
2016	23%	16%	14%	21%	24%	12%	14%	24%
2009	21%	11%	16%	18%	30%	12%	11%	15%
2006	30%	9%	21%	14%	36%	9%	21%	12%

Sumber: ILO (2017)

- Berdasarkan BPS (2018) jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal pada Februari 2018 adalah sebesar 58,22 persen. Jumlah ini turun dari tahun 2017 yang jumlah pekerja informalnya sebesar 58,35 persen. 5 Provinsi dengan jumlah persentase penduduk bekerja di sektor informal terbesar adalah sebagai berikut pada tabel 2:

Tabel 2. 5 provinsi dengan persentase pekerja informal terbesar

Provinsi	Persentase Pekerja Informal
Papua	77,58 persen
Nusa Tenggara Timur	76,95 persen
Lampung	73,12 persen
Bengkulu	71,62 persen

Nusa Tenggara Barat	71,51 persen
---------------------	--------------

Sumber: BPS (2018)

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2019, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut pemerintah mengantisipasi melalui 5 kebijakan sebagai berikut pada gambar 5:

Gambar 5. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019

III. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan 2019

Tabel 3 menunjukkan perbandingan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan antara *outlook* APBN 2018, pagu indikatif 2019, dan RAPBN 2019. Terdapat perubahan jumlah anggaran Kementerian Ketenagakerjaan pada pagu indikatif dengan RAPBN 2019 sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan antara *Outlook* 2018, Pagu Indikatif 2019 dan RAPBN 2019 pada Kementerian Ketenagakerjaan (dalam milyar rupiah)

No	Program	<i>Outlook</i> 2018	Pagu Indikatif 2019	RAPBN 2019	Persentase perubahan Pagu Indikatif dan RAPBN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	378,7	314,3	314,3	0
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	59,6	55,5	55,5	0
3	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	84,1	79,1	79,1	0
4	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	2.057,9	5.540,7	4.185,1	-24%
5	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	697,1	750,3	750,3	0

6	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	174,3	170,1	170,1	0
7	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	269,7	230,8	230,8	0
Total		3.721,3	7.140,8	5.785,2	-19%

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019 dan Bahan Rapat Kerja Kemnaker

Dari tabel 3 diketahui bahwa hanya program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas yang mengalami perubahan dari pagu indikatif. Tabel 4 disajikan untuk mengkomparasikan pagu indikatif dengan RAPBN pada rapat pembahasan APBN. Berdasarkan pagu indikatif Kementerian Ketenagakerjaan 2019, berikut rincian program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas pada tabel 4:

Tabel 4. Rincian Pagu Indikatif Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (dalam ribu rupiah)

No	Kegiatan	Output/Aktivitas Utama	Anggaran Prioritas Nasional (PN)	Anggaran Non-PN	Total Anggaran
1	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi	4 output: • Peningkatan SDM bidang Sertifikasi (PN. Target: 3.000 orang); • Tenaga Kerja yang disertifikasi (PN. Target: 900.000 orang); • Penetapan LSP berlisensi (PN. Target: 270 lembaga); • Penetapan Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI dan Okupasi (PN. Target: 100 skema).	718.253.400		718.253.400
2	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	3 output: • Calon instruktur yang dilatih (PN. Target: 308 orang); • Upgrading instruktur Pemerintah dan Swasta (PN. Target: 10.230 orang); • Kompetisi Keterampilan Instruktur.	159.110.000	30.000.000	189.110.000

3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	6 output: <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama perusahaan dengan lembaga pelatihan (PN. Target: 200 perusahaan); • Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (PN. 14 lokasi); • Pengembangan Sarana dan Prasarana BLK dan LPK (PN. 90 BLK); • Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan/Skill Development Fund (PN. 1 forum); • Akreditasi LPK; • Mutu Pengelolaan Lembaga Pelatihan. 	672.710.000	26.009.990	698.719.990
4	Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	4 output: <ul style="list-style-type: none"> • SDM stakeholder pemagangan dalam dan luar negeri yang ditingkatkan kapasitasnya (PN. Target: 4.000 orang); • Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri dan mandiri (PN. Target: 433.000 orang); • Perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri (PN. Target: 4.000 perusahaan); • Peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri (PN. Target: 6.000 orang). 	397.765.000	-	397.765.000

5	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	4 output: <ul style="list-style-type: none"> • Calon wirausaha baru yang dilatih (PN. Target: 20.000 orang); • Peningkatan Kompetensi kader produktivitas (PN. Target: 1.705 orang); • Unit usaha yang dibina (PN. Target: 2.100 perusahaan); • Pelatihan Peningkatan Produktivitas (PN. Target: 20.000 orang). 	151.518.000	-	151.518.000
6	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	4 output <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan berbasis kompetensi (PN. Target: 550.000 orang); • Pembinaan dan penetapan SKKNI (PN. Target: 150 SKKNI); • Penetapan program pelatihan (PN. Target: 275 program); • Partisipasi Indonesia dalam ajang kompetensi Keterampilan ASEAN. 	3.008.899.600	28.800.000	3.037.699.600
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalattas	3 output: <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Perkantoran; • Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; • Layanan Internal. 		347.637.356	347.637.356
Total Anggaran			5.108.256.000	432.447.346	5.540.703.346

Sumber: Bahan Rapat Kerja Kemnaker

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2018. "Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2018". Jakarta: Badan Pusat Statistik
- _____. 2018. Statistik Dasar Tenaga Kerja. www.bps.go.id. (diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)
- ILO. 2017. "*Indonesia Jobs Outlook 2017, Harnessing Technology for Growth and Job Creation*". Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2018. Rapat Kerja Kemnaker Dengan Komisi IX DPR RI, Pagu Indikatif Kemnaker T.A. 2019. Jakarta.

Daftar pertanyaan untuk pimpinan Komisi IX pada saat pembahasan APBN Induk Kementerian Ketenagakerjaan

1. Angka TPT mengalami tren penurunan tiap tahunnya sejak tahun 2015, bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker agar angka penurunan TPT tetap konsisten tiap tahunnya?
2. Terdapat 10 provinsi dengan angka TPT yang masih tinggi. Apa penyebab masih tingginya angka TPT pada 10 provinsi ini? Diketahui bahwa provinsi dengan angka TPT tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat dengan angka TPT sebesar 8,16 persen dan disusul oleh Provinsi Banten dengan angka TPT sebesar 7,77 persen. Mengapa 2 provinsi ini yang notabene masih terletak di Pulau Jawa, angka TPT nya tertinggi di Indonesia?
3. Bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker agar angka TPT pada 10 provinsi ini turun?
4. Angka TPT tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan menunjukkan terdapat penurunan TPT pada tingkat pendidikan SMP, SD, dan belum pernah sekolah. Namun terdapat peningkatan TPT pada tingkat pendidikan SMA, SMK, Akademi, dan Universitas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker agar penurunan TPT juga terjadi pada tingkat pendidikan menengah hingga tinggi?
5. Dengan fokus pemerintah terhadap peningkatan program vokasional (terlihat pada pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2018), bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker pada tahun 2019 untuk mengurangi TPT pada tingkat pendidikan SMK?
6. Sejak tahun 2006 hingga 2016, terdapat tren peningkatan *mismatch* antara kemampuan pekerja (pendidikan) dengan pekerjaan. *Mismatch* ini terutama terjadi pada perempuan dan pada lokasi pedesaan. Bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker atas permasalahan ini?
7. Hingga tahun 2018 diketahui bahwa proporsi pekerja informal Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 58,22 persen. Provinsi dengan jumlah tenaga kerja informal terbanyak adalah Provinsi Papua dengan proporsi tenaga kerja informal sebesar 77,58 persen. Bagaimana intervensi kebijakan Kemnaker untuk mengurangi jumlah pekerja informal di Indonesia dan pada provinsi-provinsi tertentu yang jumlah tenaga kerja informalnya masih tinggi? (diatas 70 persen)
8. Program Kemnaker selain program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tidak berubah antara pagu indikatif dengan RAPBN 2019. Apakah memang tidak ada perubahan juga dalam hal aktivitas dan outputnya?
9. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas mengalami perubahan dari Rp5.540,7 Milyar menjadi Rp4.185,1 Milyar. Bagaimana perubahan output pada program ini?

LAMPIRAN 11

*Potongan Gambar Penentuan Waktu
Presentasi Produk*

< 75



Slamet Widodo DP...



6 pages • 319 KB

18.32 ✓✓

Mon, 3 Sep

Pak Mohon maaf saya mengirimkan referensi yg sudah saya revisi Pak. Terima kasih sebelumnya pak 🙏

18.32 ✓✓

Iya udh sy baca. Mgg bsok bs gabung presentasi disini

19.14

Siap baik Pak, kira2 jam berapa ya Pak?

20.29 ✓✓

Bsk ada 2 analisis n 1 ref. Mgg jam 11-11.30

22.45

Tue, 4 Sep

Siap baik Pak terima kasih Pak 🙏

07.54 ✓✓

Fajri standby yh. Ini udh masuk referensi

10.11

Oh siap pak saya ke sana

10.12 ✓✓

LAMPIRAN 12

*Foto pertemuan dengan Drs.Irgan Chairul
Mahfiz, M.Si. Anggota DPR RI Komisi IX*



LAMPIRAN 13

Cover Laporan Aktualisasi

**LAPORAN HASIL AKTUALISASI
“INVENTARISASI ISU SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI
KOORDINASI PUSAT KAJIAN ANGGARAN DENGAN
KOMISI IX DPR RI”
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN I TAHUN 2018**



Disusun Oleh:

NAMA : FAJRI RAMADHAN, S.E.

NIP : 199402232018011003

JABATAN : CALON ANALIS APBN AHLI PERTAMA

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2018

LAMPIRAN 14

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor






KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama Peserta : Fajri Ramadhan, S.E.
NIP : 199402232018011003
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu : Inventarisasi Isu Sebagai Sarana Optimalisasi Koordinasi Pusat Kajian Anggaran Dengan Komisi IX DPR RI






1) Kegiatan 1 : Konsultasi dengan pimpinan

Penyelesaian Kegiatan		Catatan Mentor	Tanggal/Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	1. Mengagendakan pertemuan dengan pimpinan 2. Konsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	1. Surat keterangan melaksanakan kegiatan aktualisasi		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	1. Akuntabilitas		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Selaras dengan keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan konsultasi dengan pimpinan berkontribusi dalam mewujudkan visi pusat kajian anggaran yang akuntabel		
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan konsultasi dengan pimpinan memenuhi nilai professional pada nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI. Dengan perwujudan nilai akuntabilitas, maka nilai professional organisasi semakin menguat		






2) Kegiatan 2 : Perencanaan kegiatan inventarisasi data APBN Komisi IX

Penyelesaian Kegiatan		Catatan Mentor	Tanggal/Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor terkait dokumen rancangan kegiatan 2. Mempelajari isu-isu umum pada komisi IX dari internet 3. Pembuatan dokumen rancangan perencanaan kegiatan 		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan kegiatan inventarisasi data 		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Mutu; 2. Akuntabilitas; 		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan yang baik dapat berkontribusi mewujudkan visi Pusat Kajian Anggaran yang professional. Hal ini karena perencanaan berperan penting dalam mewujudkan profesionalitas organisasi 		
Penguatan Nilai Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serupa dengan kontribusi terhadap visi Pusat Kajian Anggaran yang professional, kegiatan perencanaan yang baik dapat memberikan penguatan nilai profesional pada organisasi 		






3) Kegiatan 3 : Koordinasi dengan Sekretariat Komisi IX perihal linimasa program

Penyelesaian Kegiatan		Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mencari kontak sekretariat komisi IX 3. Menghubungi kontak sekretariat komisi IX untuk menentukan waktu pertemuan 4. Bertemu dengan kontak sekretariat komisi IX untuk memaparkan agenda program 5. Membuat database kontak tenaga ahli komisi 	Mentor ikut dalam koordinasi dengan KabagSet Komisi IX. KabagSet Komisi IX sepakat untuk berpartisipasi pada kegiatan aktualisasi	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen laporan kegiatan pertemuan 2. Dokumentasi foto pertemuan 		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Publik; 2. <i>Whole of Government</i> 		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan koordinasi selaras dengan visi pusat kajian anggaran yang hendak mewujudkan pusat kajian anggaran yang andal melalui koordinasi dan integrasi. 		
Penguatan Nilai Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai profesionalisme 		






4) Kegiatan 4 : Membuat form daftar inventarisasi isu APBN komisi IX dan panduan pengisian form

Penyelesaian Kegiatan		Catatan Mentor	Tanggal /Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mereview anggaran-anggaran mitra kerja utama pada komisi IX 3. Membuat format form inventarisasi isu dan panduan pengisian form 4. Menyebarkan form daftar inventarisasi isu komisi IX 	Terdapat arahan dari mentor untuk mensimplifikasi bentuk form agar dapat dipahami pengisi	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format form inventarisasi isu 		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Mutu; 2. Pelayanan Publik. 		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan inventarisasi isu mewujudkan visi pusat kajian anggaran yang andal. Dengan penyediaan analisis yang sesuai dengan kebutuhan anggota dewan, merepresentasikan keandalan pusat kajian anggaran 		
Penguatan Nilai Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan inventarisasi isu menguatkan nilai professional organisasi Setjen dan BK DPR RI 		

5) Kegiatan 5 : Sosialisasi dan Verifikasi hasil form

Penyelesaian Kegiatan		Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Pembuatan materi presentasi tentang tusi pusat kajian anggaran 3. Mempresentasikan tusi PKA 4. Wawancara atau tanya jawab mengenai hasil pengisian form 		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media presentasi tusi PKA 2. Form isu yang telah terisi 		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Publik; 2. Pelayanan Publik. 		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi menguatkan visi pusat kajian anggaran yang andal. Diharapkan dengan sosialisasi yang jelas dapat menguatkan koordinasi dan integrasi pusat kajian anggaran dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 		
Penguatan Nilai Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi menguatkan nilai professional Setjen dan BK DPR RI. Sosialisasi yang baik merupakan bentuk profesionalitas dan pelayanan yang baik kepada anggota dewan 		

6) Kegiatan 6 : Pengumpulan form data APBN yang dibutuhkan PKA untuk analisis mendatang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal /Paraf Mentor
<p>Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis mendatang 3. Melakukan penyusunan database data APBN mitra kerja komisi IX 	<p>Terdapat 2 tambahan tahapan kegiatan yaitu pembuatan referensi dan diskusi dengan Anggota DPR RI Komisi IX</p>	
<p>Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen data APBN mitra kerja Komisi IX 	<p>Tambahan output berupa referensi data APBN Ketenagakerjaan Komisi IX. Terdapat beberapa masukan pada referensi APBN yaitu: memperdalam beberapa konsep lain pada pengangguran. Masukan mengenai pengangguran di Jawa Barat dan program vokasi.</p>	
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Mutu; 2. <i>Whole of Government</i>; 	<p>Terdapat tambahan implementasi mata pelatihan yaitu nasionalisme pada saat mengakomodir permintaan Anggota DPR terkait analisis APBN</p>	
<p>Kontribusi terhadap Tusi organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengumpulan data APBN komisi IX merupakan salah satu langkah kontribusi menuju visi Pusat Kajian Anggaran yang professional. Dengan tersedianya data yang andal akan mendukung kinerja Pusat Kajian Anggaran 		
<p>Penguatan Nilai Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengumpulan data APBN komisi IX menguatkan nilai professional Setjen dan BK DPR RI. 		

7) Kegiatan 7: Penyusunan Laporan Kegiatan

Penyelesaian Kegiatan		Catatan Mentor	Tanggal /Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	1. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor 2. Melakukan rekonsultasi lampiran output 3. Melakukan penulisan laporan 4. Melakukan pencetakan laporan	Untuk format pelaporan mengacu pada arahan coach	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	1. Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	1. Akuntabilitas		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	1. Pembuatan laporan kegiatan berkontribusi secara jelas dalam mewujudkan pusat kajian anggaran yang akuntabel		
Penguatan Nilai Organisasi	1. Pembuatan laporan merupakan implementasi penguatan nilai akuntabilitas.		